

**ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016
(Studi Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo)**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD ARHAN P

NIM 105710190813



**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016
(Studi Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo)**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD ARHAN P

NIM 105710190813

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal”.*
(Q.S. Al-Baqarah: 269)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016 (Studi
Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo)

Nama : Ahmad Arhan P
Stambuk : 105710190813
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Senin 20 Agustus 2018

Makassar 1 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Jusriadi, SE, MM
NIDN : 0922027901

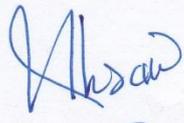

Muchriana Muchran, SE, M.Si., Ak.CA
NIDN : 0930098801

Mengeahui,

Dekan,

Ketua Program Studi IESP


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078


Hj. Naidah, SE., M. Si
NBM : 710561



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Ahmad Arhan P, NIM : 105710190813, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-Y/60201/091004/2018 M, Tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H/ 20 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Dzulhijjah 1439 H
1 September 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim H R, SE., MM. (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE., MM. (.....)
2. Dr. Agus Salim H R, SE., MM. (.....)
3. Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si. (.....)
4. Naidah, SE., M.Si. (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ahmad Arhan P
Stambuk : 105710190813
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
JudulSkripsi : "Analisis Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016 (Studi Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 1 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Arhan P
NIM : 105710190813

Diketahui,

Dekan,

Ketua Program Studi IESP



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

HJ. Naidah, SE.,M. Si
NBM : 710561

ABSTRAK

Ahmad Arhan P, 2018 ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016 (Studi Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo), Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Edi Jusriadi, dan Pembimbing II Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo, dan untuk mengetahui pengaruh kesenjangan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu PDRB Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo dan Jumlah penduduk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Entropi Theil dan Regresi Data Panel.

Analisis Entropi Theil menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Fluktuatif, sedangkan analisis menggunakan Regresi data Panel menunjukkan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.

Kata Kunci : Entropi Theil, Regresi Data Panel, pertumbuhan ekonomi, PDRB, Jumlah penduduk

ABSTRACT

Ahmad Arhan P, 2018 ANALYSIS OF ECONOMIC GAP BETWEEN DISTRICT, SOUTH PROVINSISULAWESI 2012-2016 PERIOD (Case Study of Bone, Soppeng and Wajo Regencies), Thesis of Economic Studies Program, Development Study, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Edi Jusriadi, and Supervisor II Muchriana Muchran.

This study aims to analyze how much the level of economic inequality between Bone, Soppeng and Wajo regencies, and to determine the effect of economic disparity on economic growth. This study uses secondary data, namely the GRDP of Bone, Soppeng and Wajo Regencies and the total population of Bone, Soppeng and Wajo Regencies in 2012-2016. The analytical tool used in this study is Theil Entropy Analysis and Panel Data Regression.

Theil Entropy Analysis shows that economic disparities between Bone, Soppeng and Wajo Fluctuative Regencies, while the analysis using Panel Data Regression shows economic disparities in Bone, Soppeng and Wajo Regencies have significant influence on economic growth in Bone, Soppeng and Wajo Regencies.

Keywords :Theil Entropy, Panel Data Regression, economic growth, GRDP, population

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan padawaktunya. Skripsi ini berjudul **“Analisis Kesenjangan Ekonomi antar Kabupatendi Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2016 (Studi Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo)”**, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing, maka selayaknya pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing yaitu Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE, MM dan Ibu Muchriana Muchran, SE, M.Si,.Ak.CA masing-masing sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan membimbing untuk menyatuhkan wahana sehingga terwujudnya Skripsi ini.

Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak. Ismail Rasulung, SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE, MM Selaku dosen pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Muchriana Muchran, SE, M.Si., Ak.CA Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak A. M. Yamin, SE., MS Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BPS Sulawesi Selatan.
8. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Buat sahabatku yang Selalu memberikan dorongan serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Olehnya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Billahi fii SabillHaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr,Wb.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| HAKAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. RumusanMasalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Teori..... | 6 |
| 1. Pembangunan Ekonomi | |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi | 7 |
| 3. Teori Pertumbuhan | 9 |
| 4. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah | 14 |
| 5. Dampak Kesenjangan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Pengukur Kesenjangan Ekonomi..... | 20 |
| B. Tinjauan Empiris..... | 26 |
| C. Kerangka Konsep..... | 32 |
| D. Hipotesis..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 34 |
| C. Defenisi Operasional Variable | 34 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| E. Analisi Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian..... | 40 |
| B. Analisi Deskriptif..... | 55 |
| C. Hasil Penelitian | 83 |
| D. Uji Spesifikasi Model | 87 |
| E. Uji Signifikansi..... | 89 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 90 |
| B. SARAN | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 94 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | | Halaman |
|----------|--|---------|
| Tabel 1 | PDRB Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo atas harga konstan Tahun 2012-2016 | 2 |
| Tabel 2 | Persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo tahun 2012-2016 | 2 |
| Tabel 3 | Jumlah penduduk di kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016 | 3 |
| Tabel 4 | Peranan PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha (persen) 2012-2016 | 41 |
| Tabel 5 | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bone Menurut lapangan Usaha (persen) 2012-2016 | 43 |
| Tabel 6 | Peranan PDRB kabupaten Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012-2016..... | 46 |
| Tabel 7 | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016 | 48 |
| Tabel 8 | PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2012–2016 | 49 |
| Tabel 9 | Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Wajo, 2012-2016 (persen)..... | 51 |
| Tabel 10 | PDRB Perkapita Kcamatan Wajo, 2012-2016 (Juta Rupiah) | 55 |
| Tabel 11 | Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2012-2016..... | 56 |
| Tabel 12 | Peranan dan pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan (Persen), 2012-2016..... | 57 |
| Tabel 13 | Peranan Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB kategori Industri Pengolahan (Persen), 2012-2016 | 58 |
| Tabel 14 | Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2012-2016..... | 60 |

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 15 | Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2012-2016..... | 62 |
| Tabel 16 | Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2012-2016 | 63 |
| Tabel 17 | Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012-2016..... | 64 |
| Tabel 18 | Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo, 2012-2016 (persen) | 74 |
| Tabel 19 | Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016 | 83 |
| Tabel 20 | Hasil Perhitungan Tingkat Kesenjangan Ekonomi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Periode 2012-2016..... | 84 |
| Tabel 21 | Rata-rata Indeks Entropi Theil dan PDRB Perkapita Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Periode 2012-2016..... | 85 |
| Tabel 22 | Regresi Data Panel : Hasil tes Redundant Fixed Effect-Likelihood Ratio | 87 |
| Tabel 23 | Hasil uji Hausman..... | 88 |
| Tabel 24 | Hasil Uji Parsial | 88 |
| Tabel 25 | Koefensi Determinansi..... | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1 Kurva Lorenz | 21 |
| Gambar 2 Koefensi Gini | 22 |
| Gambar 3 Kerangka Konsep | 33 |
| Gambar 4 PDRB Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2011-2016. | 11 |
| Gambar 5 PDRB Perkapita Kabupaten Bone (Rupiah), 2011–2016 | 44 |
| Gambar 6 PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng (Rupiah), 2012–2016 | 49 |
| Gambar 7 PDRB Perkapita Kabupaten Wajo (Rupiah), 2012–2016 | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. PDRB Kabupaten Bone, Soppeng Dan Wajo Tahun 2012-2016 | 94 |
| 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016..... | 94 |
| 3. PDRB Perkapita Kabupaten Bone Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016..... | 94 |
| 4. Luas wilayah jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bone Soppeng dan Wajo Tahun 2016..... | 95 |
| 5. Hasil Perhitungan Indeks Entropi Theil Tahun 2012- 2106..... | 95 |
| 6. Tabel Variabel Independent dan Dependent | 96 |
| 7. Output Common Effect ModelTahun 2012-2016 | 96 |
| 8. Output Fixed Effect ModelTahun 2012-2016 | 97 |
| 9. Output Random Effect ModelTahun 2012-2016 | 98 |
| 10. Output Uji ChowTahun 2012-2016 | 99 |
| 11. Hausman TestTahun 2012-2016 | 100 |
| 12. Surat Keterangan Penelitian..... | 101 |
| 13. BIOGRAFI PENULIS..... | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian. Yakni perubahan landasan kegiatan ekonomi dan kerangka susunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, antara perubahan struktur dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat (Djojohadikusumo, 1994).

Salah satu indikator pokok dalam mengatur Keberhasilan pembangunan suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, lalu menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri artinya adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sadono, 2007). Ini berarti bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan adalah PDRB, masing-masing daerah kabupaten/kota kita dapat mengetahui seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya, dengan kata lain pemerataan pendapatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dua puluh satu (21) kabupaten dan tiga (3) kota.

Tabel 1
PDRB Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo atas harga konstan Tahun
2012-2016 (Milyar Rupiah)

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 12,730 | 13,532 | 14,821 | 16,051 | 17,505 |
| Soppeng | 4,260 | 4,568 | 4,882 | 5,131 | 5,554 |
| Wajo | 8,819 | 9,429 | 10,341 | 11,070 | 11,621 |
| Jumlah/Total | 25,809 | 27,528 | 30,045 | 32,251 | 34,680 |

Sumber : BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah), 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah PDRB Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo dalam satuan milyar rupiah. PDRB Kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bone yakni sebesar 17,505 pada tahun 2016, dan terkecil adalah Kabupaten Soppeng yakni sebesar 4,260 pada tahun 2012. Berdasarkan data tersebut kemungkinan terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten tersebut dengan mengkaji data lima tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2016.

Tabel 2
Persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo
Tahun 2012-2016

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 0.082 | 0.063 | 0.095 | 0.083 | 0.091 |
| Soppeng | 0.069 | 0.072 | 0.069 | 0.051 | 0.082 |
| Wajo | 0.065 | 0.069 | 0.097 | 0.070 | 0.050 |
| Jumlah/Total | 0.074 | 0.067 | 0.091 | 0.073 | 0.075 |

Sumber : BPS, PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah), 2018

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan ekonomi dari 3 kabupaten pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Wajo yaitu 0,097 pada

tahun 2014 dan pertumbuhan ekonomi yang terendah di Kabupaten Soppeng yaitu 0,050 pada tahun 2016.

Selain pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Kesenjangan ekonomi berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi kesenjangan ekonomi berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah kelompok miskin).

Kesenjangan didefinisikan sebagai kondisi ketidakadilan. Kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam sebuah pertandingan antara dua titik ekstrim: kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu, serta punya kesempatan dan tidak memiliki kesempatan. Kesenjangan adalah sebuah perbandingan jarak diantara kedua titik ekstrem tersebut.

Tabel 3

Jumlah penduduk di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 728,737 | 734,119 | 783,515 | 742,912 | 746,973 |
| Soppeng | 226,202 | 225,512 | 225,709 | 226,116 | 226,305 |
| Wajo | 389,552 | 390,603 | 391,980 | 393,218 | 394,495 |
| Jumlah | 1,344,491 | 1,350,234 | 1,401,204 | 1,362,246 | 1,367,773 |

Sumber : BPS, Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah), 2018

Berdasarkan table 3 jumlah penduduk dari tiga kabupaten, jumlah penduduk tertinggi tertinggi pada Kabupaten Bone tahun 2016 yakni 783,515 jiwa pada tahun 2014 dan jumlah penduduk terkecil pada Kabupaten Soppeng yakni 225,709 jiwa pada tahun 2013. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, disisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi suatu produk yang dihasilkan. (Baharuddin, 2013)

Dari uraian tersebut maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang analisis kesenjangan ekonomi antar Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo periode 2012-2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dijadikan landasan pembahasan yaitu:

1. Seberapa besar tingkat kesenjangan ekonomi antar Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo periode 2012 - 2016?
2. Apakah kesenjangan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo periode 2012 –2016
2. Mengetahui Pengaruh Kesenjangan kesenjangan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu ekonomi khususnya berkaitan dengan pengkajian kebijakan ekonomi daerah. Disamping itu penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi yaitu:

- a. Menambah wacana, informasi dan kajian tentang pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat:

- a. Bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dapat digunakan sebagai pertimbangan alternatif untuk Menyusun kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menentukan tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten kota.
- b. Bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah bahan studi kepustakaan tentang pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pertimbangan studi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan (*development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional - yang kondisi ekonomi awalnya kurang bersifat statis dalam kurun waktu yang lama - untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto dan GNI (*gross national income*) tahunan pada tingkat 5% - 7% atau bahkan lebih tinggi jika hal itu memungkinkan. (Todaro, 2006)

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. (Arsyad, 2002)

Perkembangan pembangunan yang semakin tinggi mendorong pemerintah pusat dan daerah berupaya merencanakan pembangunan semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang menjadi titik perhatian adalah mengenai konsep dasar daerah dan berbagai studi empiris tentang kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut penyebarannya di berbagai daerah.

Menurut Arsyad (2002), tinjauan aspek ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi 3 definisi, yaitu :

- a) Suatu daerah dianggap sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan tersebut tercermin dari pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya dan sebagainya dan biasanya disebut daerah homogen.
- b) Suatu daerah dianggap sebagai suatu “ruang ekonomi” yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi dan biasanya disebut daerah nodal.
- c) Suatu daerah adalah suatu “ruang ekonomi” yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya dan biasanya dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan output suatu daerah biasanya dipakai sebagai indikator dari pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lainnya. Pertumbuhan output per pekerja digunakan sebagai indikator perubahan tingkat keunggulan

suatu daerah melalui pertumbuhan produktivitas, sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. (Etharina, 2005)

Konsep pusat pertumbuhan dalam perencanaan pembangunan regional dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa wilayah pembangunan dengan menentukan sebuah pusat pertumbuhan pada masing-masing daerah seperti yang dilakukan di tingkat nasional maupun provinsi. Aspek kesamaan kondisi sosial ekonomi dan potensi pembangunan yang dimiliki (*homogeneous region*) dan keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitarnya (*nodal region*) merupakan bagian dalam menentukan wilayah pembangunan.

Sementara itu, aspek pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong melalui pemanfaatan keterkaitan antara dinamika kegiatan ekonomi pada pusat pertumbuhan karena adanya keuntungan aglomerasi yang didukung dengan potensi ekonomi wilayah bersangkutan. Sedangkan aspek pemerataan akan dapat pula ditingkatkan karena potensi ekonomi wilayah bersangkutan akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, penentuan wilayah dan pusat pertumbuhan secara lebih tersebar tentunya juga akan mendorong terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah. (Sjafrizal, 2008)

Kuznets yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa pada tahap awal dari proses pembangunan ekonomi, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar provinsi mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar provinsi tetapi pada jangka panjang pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dengan asumsi mekanisme pasar bebas dimana mobilitas semua faktor produksi antar provinsi berjalan lancar tanpa sedikitpun

rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung mengecil. Dengan tingkat pendapatan/kapita yang semakin tinggi di setiap provinsi yang akhirnya menghilangkan kesenjangan ekonomi regional. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva U – terbalik dari Kuznets. (Todaro, 2006)

3. Teori Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan proses kemajuan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menggambarkan tercapainya suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi nasional, peningkatan jumlah konsumsi dan yang terpenting adalah peningkatan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan nilai secara agregat, bukan secara parsial. Faktanya proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia pada saat ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dibarengi dengan pembagian porsi pendapatan yang merata diantara pelaku ekonomi.

Perhatian utama di Negara sedang berkembang adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Pada tahun 1960-an sebagian besar NSB yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, tingkat kehidupan nampaknya mengalami stagnasi dan bahkan untuk beberapa negara malah terjadi penurunan tingkat kehidupan riil. Tingkat pengangguran dan

pengangguran semu meningkat di daerah pedesaan dan perkotaan. Distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin tidak merata. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP perkapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan tingkat hidup rakyat. Apa yang disebut dengan penetesan ke bawah (*trickle down effect*) dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi. Sekalipun dalam empat dekade terakhir beberapa NSB telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, malahan lebih pesat daripada yang pernah dialami negara-negara Barat selama tahap-tahap awal dari proses industrialisasi mereka, namun pertumbuhan ekonomi yang pesat ini pada umumnya ternyata tidak berhasil menyediakan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk yang tumbuh begitu cepat dan juga kurang berhasil dalam mengurangi laju kemiskinan yang begitu memprihatinkan (Arsyad, 2010)

a) Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith Ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan *laissez-faire*, yaitu kebijakan yang bersifat memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan gaya yang disukainya dan meminimalkan peranan pemerintah dalam perekonomian, tetapi juga merupakan ahli ekonomi yang banyak menumpahkan Perhatian Kepada masalah Pembangunan, seperti dapat dilihat dalam judul bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. tulisan ini terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara, Menurut pandangan atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat (Sukirno, 2007). Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia

menganggap setiap orang sebagai Hakim yang paling tahu akan kepentingan sendiri yang sebaliknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan itu demi keuntungan sendiri (Jhingan, 2013).

Faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan. ekonomi penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan di antara Tenaga Kerja dan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas Tenaga Kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Kuncoro dalam Nurul Huda (2015) menjelaskan bahwa Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan yang terakhir tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, ada Smith memendam bekerja sebagai salah satu input (masukan) dari proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik Sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu peningkatan keterampilan kerja dan penemuan masing-masing yang

menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik.

b) Teori Pertumbuhan Keynes

Beberapa teori yang dikemukakan oleh Keynes antara lain secara ringkas bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume tergantung dalam permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditemukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi dimana permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi.

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam *general theory*-nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti, Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul "*Economic Possibilities for Our Grand Children*," Keynes mengemukakan Beberapa syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu:

- 1) Kemampuan kita mengendalikan penduduk
- 2) Kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil
- 3) Kemampuan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, memedomani hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan.

- 4) Tingkat akumulasi yang ditemukan oleh margin antara produksi dan konsumsi

c) Teori Pertumbuhan W.W Rostow

Salah satu teori mengenai pembangunan ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian dan komentar yaitu teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetus oleh W.W. Rostow, yang pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam *Economic Journal* dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya *The Stage of Economic growth*. Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Kelima tahap pertumbuhan ini, yaitu: masyarakat tradisional (*the traditional Society*), prasyarat untuk lepas landas (*the precondition for take off*), Lepas Landas (*take off*), gerakan kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*The Age of High Mass consumption*). tahap-tahap yang berbeda ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap dapat mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan tranisi menuju tahap baru yang berkualitas.

Teori Rostow tidak secara terperinci menganalisis corak perubahan yang terjadi pada suatu sektor dalam proses pembangunan. analisisnya lebih dititikberatkan pada peranan beberapa faktor utama yang memicu pertumbuhan ekonomi dan kepada ciri-ciri perubahan dalam setiap tahap pembangunan suatu masyarakat. analisis rostow didasarkan kepada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental

bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat.

Rostow membuat penggolongannya berdasarkan kepada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi. menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan suatu proses yang berdimensi banyak. pembangunan ekonomi bukan saja Berarti perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara yang menyebabkan peranan sektor pertanian menurun dan peranan kegiatan industri meningkat.

4. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara –negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*Reverse U-shape Curve*)

5. Dampak Kesenjangan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Thee Kian Wie, dalam Budi Basa Siregar (2012) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

- a) Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*);
- b) Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*);
- c) Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*);

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi pada awal proses pembangunan. Pada

akhir proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. (Tambunan, 2001)

Menurut Gittelman dan Joyce dalam Arief dan Yundy (2010), pendapatan yang terbesar diperoleh individu atau keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dari pasar kerja. Pendapatan yang diperoleh dari pasar kerja antar satu individu dengan individu lain akan berbeda-beda. Besarnya tingkat pendapatan ini dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja tersebut.

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznets Hypothesis. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Indikasi yang diberikan oleh Kuznets di atas didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan negara Inggris, Jerman dan Amerika Serikat.

Hipotesis Kuznet bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif berarti dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan. (Arief dan Yundy, 2010)

Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor-sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. (Joko Waluyo, 2004).

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2006).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah

yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik modal (*investor*) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Kuncoro, 2004)

Menurut Sjahrizal (2008), ada beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah dan akan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut, diantaranya adalah :

a) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih lambat.

b) Perbedaan Kondisi Demografis

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Jumlah populasi yang besar dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik serta etos kerja yang tinggi didukung dengan berbagai fasilitasnya yang ada menjadikan perekonomian Jawa lebih dinamis sehingga lebih maju dan luar Jawa. (Tambunan, 2001)

c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Ketimpangan ekonomi regional dapat juga disebabkan karena kurang lancarnya mobilitas faktor produksi antar daerah terutama antar pulau. Keadaan ini akan menyebabkan semakin berkumpulnya faktor produksi terutama tenaga kerja ke daerah yang memiliki selisih upah tinggi, mengikuti pola Todaro migration model, bukan mengikuti model *unlimited supply of labour* dari Lewis (Todaro, 2006).

Migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d) **Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah**

Menurut Tambunan (2001), konsentrasi kegiatan ekonomi terutama industri manufaktur di daerah tertentu menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi atau dengan kata lain mengalami industrialisasi akan tumbuh pesat.

e) **Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah**

Daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi. Demikian sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

6. Pengukur Kesenjangan Ekonomi

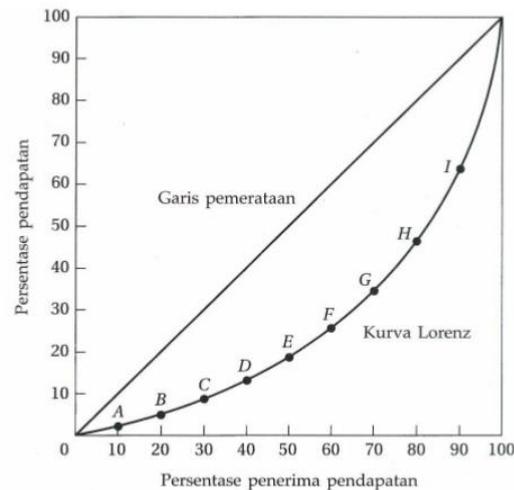
Terdapat beberapa alat analisis yang biasa digunakan untuk membedah persoalan kesenjangan ekonomi, analisis yang paling sederhana ialah melihat distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) (Eka Sastra, 2017)

Pengukuran ketimpangan dapat dilakukan dengan beberapa metode pengukuran ketimpangan, diantaranya adalah :

a) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk

dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama waktu tertentu. (Todaro, 2006)



Gambar 1

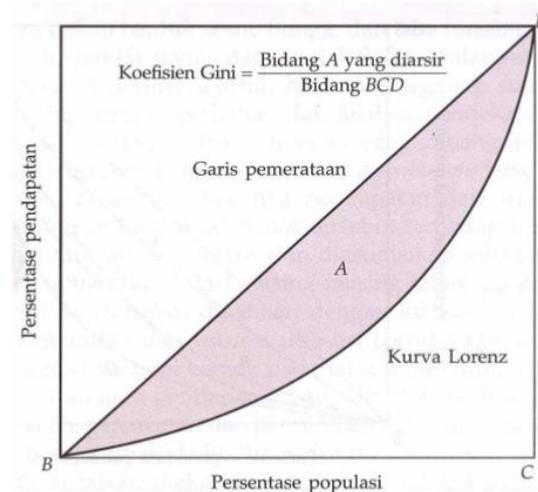
Kurva Lorenz

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

b) Koefisien Gini

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara biasa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut.

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada hakekatnya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0.5 hingga 0.7, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0.2 hingga 0.5. (Todaro, 2006)



Gambar 2

Koefensi Gini

c) Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studinya pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. (Arief dan Yundy, 2010)

Williamson meneliti hubungan antar kesenjangan ekonomi regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, menemukan selama tahap awal pembangunan, kesenjangan ekonomi regional menjadi lebih besar

dan pembangunan terkonsentrasi di daerah daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan kesenjangan ekonomi berkurang dengan signifikan. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini sering digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. (Sjafrizal, 2008)

Indeks Williamson merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Indeks ini digunakan untuk mengukur koefisien variasi tertimbang suatu daerah dan kesenjangan ekonomi dalam proses pembangunan. Indeks Williamson juga mengukur penyebaran tingkat pendapatan perkapita antara wilayah relatif terhadap rata-rata pusat dimana tiap deviasi wilayah dibobot sumbangannya dengan penduduk daerah secara keseluruhan. Hasil dari penelitian Jeffrey Williamson menunjukkan bahwa :

- a) Kesenjangan ekonomi antar daerah akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian nasional.
- b) Kesenjangan ekonomi antar daerah di negara yang sedang berkembang lebih tinggi dari kesenjangan ekonomi antar daerah di negara maju.

Beberapa hal yang mempengaruhi hasil tersebut :

- a. Migrasi tenaga kerja, di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain biasanya selektif, dalam arti tenaga kerja pada usia produktif dan pada umumnya yang pendidikannya relatif tinggi. Sehingga akibatnya, di daerah yang miskin ditinggalkan oleh penduduk yang relatif produktif, sehingga perbedaan antar daerah maju dan

terbelakang semakin besar. Hal tersebut tidak terjadi di negara maju, antara lain karena fasilitas yang tersedia di setiap daerah relatif lebih homogen, sehingga penduduk yang pindah bukan hanya yang lebih produktif saja, tetapi juga orang yang kalah bersaing.

- b. Migrasi capital, di negara maju biasanya kapital lari ke daerah yang relatif miskin, karena tingkat pengembaliannya (*rate of return of capital*) lebih tinggi di daerah yang miskin. Hal ini tidak terjadi di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sarana yang ada, sehingga akibatnya investasi yang dilakukan di daerah yang miskin akan menjadi lebih mahal dibandingkan jika dilakukan di daerah yang relatif sudah maju.
- c. Keterkaitan antar daerah, di negara maju keterkaitan antar daerah sangat tinggi, sehingga arus informasi tidak menjadi masalah utama. Di negara yang sedang berkembang, infrastruktur belum berkembang dengan baik, sehingga arus informasi tidak berjalan dengan lancar, yang pada gilirannya menyebabkan keterkaitan antar daerah tidak terlalu erat.
- d. Kebijakan pemerintah pusat, di negara yang maju, karena tingkat pendapatan perkapita telah tinggi, maka yang lebih dipentingkan oleh pemerintah pusatnya adalah masalah pemerataan. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, karena pendapatan perkapitanya masih rendah, pemerintah masih memprioritaskan pertumbuhan. Walaupun di negara yang sedang berkembang tujuan pertumbuhan lebih diutamakan, namun masalah distribusi pendapatan ini tidak boleh ditinggalkan. Adanya ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain kecemburuan antar daerah dan berbagai masalah kependudukan (*migrasi/urbanisasi/under employment*, dan sebagainya), yang pada

gilirannya akan sangat berpengaruh pada kestabilan nasional. (Budi 2012 dalam Susanti dkk).

Kelebihan Indeks Williamson adalah mudah dan praktis dalam melihat kesenjangan ekonomi. Sedangkan kelemahannya adalah Indeks Williamson bersifat agregat sehingga tidak diketahui daerah mana saja yang memberikan kontribusi terhadap kesenjangan ekonomi. (Achjar, 2004)

Indeks Williamson (IW), dengan besaran nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar IW maka semakin besar kesenjangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai $IW < 0,3$ berarti kesenjangan ekonomi yang terjadi tergolong rendah, IW antara $0,3 - 0,5$ termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika $IW > 0,5$. (Kuncoro,2004).

d) Indeks Theil

Indeks Theil digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini adalah sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Williamson Index yaitu PDRB perkapita untuk setiap wilayah dan jumlah penduduk. Demikian pula halnya dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 yang berarti sangat merata.

Penggunaan Theil Index sebagai ukuran ketimpangan mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas. Dalam kasus Indonesia, menggunakan metode ini dapat dihitung ketimpangan

dalam provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kedua, dapat menghitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. (Sjafrizal, 2008)

B. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Baharuddin pada tahun 2013 dengan judul “ Analisis Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Periode 2006-2010” untuk mengetahui seberapa besar tingkat disparitas pendapatan menggunakan Indeks Williamsons, Hasil dari analisis tersebut memperlihatkan tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu menganalisis tingkat disparitas pendapatan antar wilayah dan persamaan objek penelitian yaitu sebuah provinsi, sedangkan perbedaannya adalah teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan teknik analisis Entropi Theil.

Penelitian Oleh Doni Mahardiki pada tahun 2013 untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia 2006-2011, dan mengetahui pola/klasifikasi daerah yang didasarkan pada pertumbuhan ekonominya. Metode perhitungan untuk analisis ketimpangan adalah Indeks ketimpangan Williamson dan Indeks ketimpangan Entropi Theil, Menurut hasil perhitungan Indeks Williamson, selama periode penelitian tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia menunjukkan pergerakan yang meningkat dengan nilai pada tahun 2011 sebesar 0,83. Berdasarkan uji paired t-Test ditemukan hasil bahwa terdapat kesenjangan

ekonomi yang signifikan pada 2011 dibandingkan dengan 2006. Sedangkan hasil dari Indeks Theil didapatkan tingkat ketimpangan di Indonesia selama periode penelitian cenderung menurun dengan nilai sebesar 0,34 pada tahun 2011 meskipun meningkat pada akhir periode. Hasil dari tipologi Klassen menunjukkan bahwa kecenderungan provinsi berada pada kategori daerah maju tapi tertekan.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu untuk mengetahui kesenjangan ekonomi dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Penelitian oleh Husni Mubarak pada tahun 2017 dalam bentuk Skripsi dengan judul "Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan Mamminasata". Pokok masalah yang diteliti yaitu Pola dan Struktur ekonomi dan dalam hal ini menggunakan Tipologi Klassen dan Indeks Williamson, Berdasarkan Indeks Williamson ketimpangan yang terjadi di Kawasan Mamminasata periode 2011-2015 antar kabupaten pada periode tersebut terjadi ketimpangan yang cukup tinggi dan hal ini menunjukkan semakin melebarnya ketimpangan di Kawasan Mamminasata Rata-rata angka Indeks Williamson di Kawasan Mamminasata adalah sebesar 0,885.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu menganalisis disparitas pendapatan dan meneliti pola dan struktur ekonomi suatu wilayah, sedangkan perbedaannya adalah teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah Entropi Theil.

Penelitian oleh Sudarlan pada tahun 2015 dalam bentuk Jurnal dengan judul Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia bertujuan untuk mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan

ekonomi dan kemiskinan di Indonesia periode 2002 – 2011. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatoris dengan data time-series dan cross-section dan mengaplikasikan model persamaan simultan (2SLS). Penelitian berkesimpulan bahwa kesenjangan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik, pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap kesenjangan ekonomi sebesar 0,1333, tetapi penduduk miskin tidak signifikan berpengaruh terhadap kesenjangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi tidak berpengaruh pada penduduk miskin di Indonesia.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu menganalisis kesenjangan ekonomi suatu wilayah sedangkan perbedaannya adalah teknik analisis yang penulis menggunakan adalah Entropi Theil.

Penelitian dilakukan oleh Darzal tahun 2016 dalam bentuk jurnal berjudul Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di provinsi Jambi bertujuan untuk menganalisis : 1) Tipologi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi 2) Disparitas pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Jambi 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Provinsi Jambi. Untuk menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi digunakan tipologi klasen, untuk menganalisis tingkat disparitas pendapatan menggunakan alat analisis indeks Williamson sedangkan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan digunakan model persamaan regresi data panel. Dari analisis tipologi klasen, tidak terdapat kabupaten/kota yang masuk ke kuadran satu sedangkan untuk kuadran dua terdapat empat kabupaten/kota. Untuk kuadran tiga terdapat satu kabupaten/kota, sedangkan untuk kuadran empat terdapat enam kabupaten/kota.

Hasil perhitungan indeks Williamson menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2009 indeks Williamson sebesar 0,365, pada tahun 2010 naik menjadi 0,397, pada tahun 2011 turun menjadi 0,394, pada tahun 2012 kembali naik menjadi 0,401 dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,397. Selanjutnya, berdasarkan analisis regresi ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja langsung dan TPAK terhadap pendapatan per kapita sedangkan untuk panjang jalan tidak berpengaruh secara signifikan.

Jika dilihat dari pernyataan tersebut terdapat persamaan yaitu menganalisis disparitas pendapatan dan menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi sedangkan, perbedaannya adalah teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu Entropi Theil.

Penelitian oleh Khairul Amri tahun 2017 dalam bentuk jurnal berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan adalah data panel dari 8 provinsi di Sumatera selama periode tahun 2007-2015. Peralatan analisis data yang digunakan adalah panel vector autoregression (PVAR) dan panel granger causality test. Penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Kesenjangan ekonomi pada periode tahun tertentu juga secara signifikan dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi tahun sebelumnya. Hasil panel granger causality test menemukan adanya unidirectional causality dari kesenjangan ekonomi ke pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu untuk menganalisis kesenjangan ekonomi di suatu wilayah sedangkan perbedaannya terdapat pada teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah Entropi Theil.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono pada tahun 2015 dalam bentuk jurnal yang berjudul “Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo” dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah di daerah hasil pemekaran. Penelitian dilakukan di Provinsi Banten dan Gorontalo dengan menggunakan data sekunder tahun 2007-2011 dan data primer hasil wawancara dan FGD. Perkembangan ekonomi dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, ketimpangan dengan indeks entropi Theil. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota, Banten terdapat empat daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, satu daerah maju tapi tertekan, satu daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Sedangkan Gorontalo dari 6 kabupaten/kota terdapat dua daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, dua daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Indeks entropi Theil Banten 3,96 dan Gorontalo 1,16. Sebagai daerah hasil pemekaran Banten memiliki ketimpangan paling tinggi, sedangkan Gorontalo sama dengan ketimpangan yang ada di daerah yang tidak dimekarkan terutama di luar Pulau Jawa. Salah satu penyumbang terbesar ketimpangan di Banten adanya pemusatan industri di Kota Cilegon. Sedangkan ketimpangan yang rendah di Gorontalo karena fokus pada pertanian yang merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Penelitian ini menyarankan pemerintah memperhatikan faktor pemusatan ekonomi, karena faktor ini dapat

menjadikan kebijakan pemekaran gagal mewujudkan pemerataan sebagai salah satu tuntutan lahirnya pemekaran.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu untuk mengetahui ketimpangan antar daerah dan teknik analisis yang digunakan ya itu Tipologi Klassen dan Entropi Theil.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Khusnah pada tahun 2015 dalam bentuk jurnal berjudul “ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2008-2013” bertujuan untuk mengetahui tingkat disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, kemudian mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto dan tenaga kerja terdidik terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan pembuktian hipotesis kuznets di Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah Indeks Entropy Theil untuk mengukur disparitas pendapatan, Regresi linear berganda dengan metode Random Effects Model (REM), analisis Trend pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Jawa Timur sebagai pembuktian hipotesis kuznet. Hasil penelitian menunjukkan disparitas pendapatan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur adalah tinggi. Secara simultan variabel DAU, PDRB dan Tenaga Kerja Terdidik signifikan terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2008-2013. Hipotesis Kuznets tentang kurva U terbalik terbukti di Jawa Timur.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu Untuk mengetahui tingkat disparitas pendapatan antar wilayah dan teknik analisis yang digunakan adalah Entropi Theil.

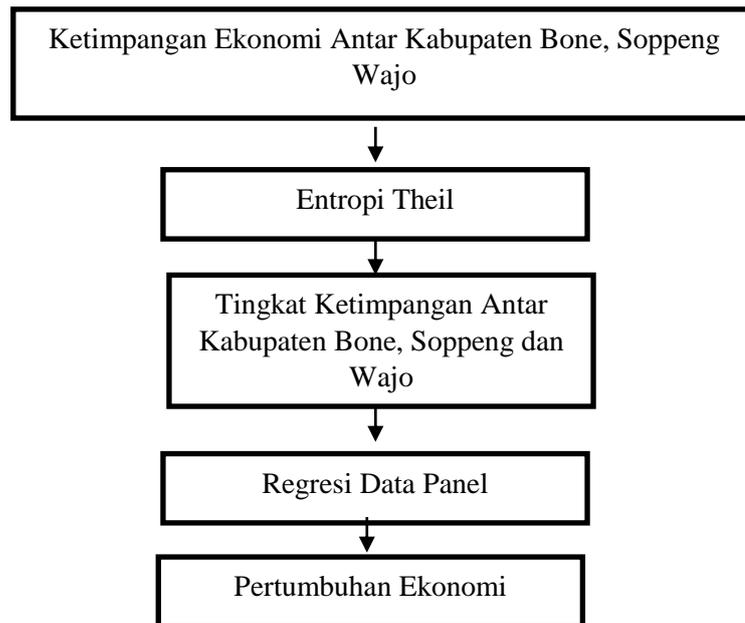
Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Ratih Ari Indrayani pada tahun 2010 dalam bentuk jurnal yang berjudul “DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TENGAH” ini bertujuan melihat tingkat disparitas pendapatan antar wilayah pada 10 kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah pada dua kurun waktu, yaitu tahun 1996- 1999 dan tahun 2004-2007. Kajian ini berlandaskan pada hipotesis Simon Kuznets (1955) yang menyebutkan bahwa ketimpangan (disparitas) pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dan cenderung menurun pada tahap-tahap berikutnya mengikuti kurva U-terbalik. Dengan menggunakan Indeks Williamson diperoleh hasil bahwa semakin tinggi pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar pula disparitas pendapatan yang terjadi. Disparitas berfluktuasi dan cenderung meningkat pada tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Jika dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu bertujuan melihat tingkat disparitas pendapatan antar wilayah sedangkan perbedaannya adalah teknik analisis yang digunakan oleh penulis Entropi Theil

C. Kerangka Konsep

Ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Kajian pertumbuhan ekonomi dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo dilihat melalui PDRB dan pendapatan perkapitanya. PDRB merupakan indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi daerah. Dengan demikian dapat dicermati laju pertumbuhan ekonominya. Sedangkan pendapatan perkapita merupakan hasil bagi PDRB

dengan jumlah penduduk yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan antar daerah di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo akan diukur dengan menggunakan Indeks Entropi Theil yang bernilai antara 0-1



Gambar 3
Kerangka Konsep

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan sebelumnya dengan melihat tujuan dan manfaat yang akan di capai dalam penulisan ini, maka penulis menarik hipotesis yakni:

1. Diduga terjadi kesenjangan ekonomi antar Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo periode 2012-2016.
2. Diduga kesenjangan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng Wajo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, untuk mengetahui nilai variabel penelitian berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:14).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo sebagai daerah penelitian karena berdasarkan perkembangan aktual perekonomian regionalnya, terdapat ketimpangan jumlah PDRB yang dihasilkan antar satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya. Selain itu faktor kemudahan peneliti dalam mendapatkan data juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan ini. Sedangkan jangka waktu dalam melakukan penelitian ini yaitu bulan April sampai Mei 2018.

C. Defenisi Operasional Variabel dan Penjelasannya

Variabel-variabel yang dioperasionalisasikan dalam penelitian ini adalah semua variabel yang terkait dalam rumusan hipotesis. Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan di analisis, maka akandi berikan batasan terhadap variebel-variabel berikut ini:

1. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini

tercermin dari perbedaan pendapatan. Analisis yang digunakan adalah indeks Entropi Theil untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun dinyatakan dalam persen per tahun.

3. Produk Domestik Regional Bruto PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai produksi neto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu regional wilayah selama jangka waktu tertentu yaitu 1 tahun. Unit unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 kelompok lapangan usaha (sektor).

4. PDRB Perkapita.

PDRB perkapita merupakan total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah bersangkutan.

5. Penduduk

BPS mendefinisikan bahwa yang dimaksud penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan dan atom mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (dalam satuan jiwa).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana Data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

Data penelitian ini dari hasil publikasi BPS yang mencakup.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2012-2016.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo 2012-2016.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo atas dasar harga konstan tahun 2012-2016.
4. PDRB perkapita Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo atas dasar harga konstan tahun 2012-2016.

E. Analisis Data

Analisis yang di gunakan pada penelitian ini adalah Indeks Entropi Theil dan Regresi Data Panel.

1. Indeks Entropi Theil

Tingkatkesenjangan ekonomi di Kabupaten Bone Soppeng dan Wajo dihitung dengan Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil digunakan untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Jika nilai Indeks Entropi Theil mendekati nol, maka tingkat kesenjangan distribusi pendapatan semakin kecil (semakin merata).

Sebaliknya, jika nilai indeks Entropi Theil semakin jauh dari nol maka kesenjangan semakin melebar. Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan sebagai berikut. Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan sebagai berikut :

$$T_d = (Y_{ij}/Y) \log [(Y_{ij}/Y)/(n_{ij}/N)] \dots\dots\dots$$

Keterangan :

- T_d = Indeks Entropi Theil
- Y_{ij} = PDRB perkapita Kabupaten
- Y = PDRB perkapita Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo
- n_{ij} = Jumlah Penduduk di Kabupaten
- N = Jumlah Penduduk di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo

2. Regresi Data Panel

Nilai suatu variabel dapat berubah biasanya disebabkan oleh perubahan variabel lain yang berhubungan dengannya. Pola perubahan nilai suatu variabel biasanya menggunakan teknik analisa regresi untuk menganalisis hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan melakukan analisis regresi maka kita dapat membuat perkiraan

Regresi data panel adalah penggabungan cross section dan time series. Data cross section adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Sedangkan Data time series adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Dalam data panel, observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Model Regresi Panel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + bX_{1it} + e$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi (Dependent)

X = kesenjangan Ekonomi (Independet)

b = Koefisien regresi variabel independen

i = kabupaten

t = periode

α = Konstanta

e = Error term

a. Uji Spesifikasi Model

- 1) Uji Spesifikasi Model dengan *Uji Chow* bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. *Uji Chow* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *model common effect* yang sebaiknya dipakai.

H_0 : Common Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Ketika model yang terpilih *adalah fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji *Hausmann* untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

- 2) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausmann bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Dalam FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan time-invariant. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua

intersep (*cross section*) dan komponen e mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati : 2013).

Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut :

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Jika hipotesis 0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM. Karena REM kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah REM.

b. Uji Signifikansi

1. Uji Parsial (t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika $\text{prob} < \text{taraf sig } 5\%$, maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Koefisien Determinasi (R^2) atau goodness of fit digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai dari R^2 berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat dan sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

1. Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km² dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Bone terdiri dari:

0 m - 100 m = 39,88 %

101 m - 500 m = 45,09 %

501 m -1000 m = 12,70 %

1.001 m keatas = 2,34 %

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 76% - 85% dengan temperatur berkisar 24,6^oC – 28,7^oC. Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 4^o13' dan 5^o06' Lintang Selatan, serta 119^o42' dan 12^o040' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batasbatas:

Utara - Kabupaten Wajo dan Soppeng,

Selatan - Kabupaten Slnjai dan Gowa

Barat - Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru

Timur - Teluk Bone.

a. Struktur Ekonomi Kabupaten Bone

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Bone tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone.

Tabel 4

Peranan PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha/Industry | Tahun | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 47,88 | 47,49 | 49,40 | 49,27 | 49,69 |
| Pertambangan dan Penggalian | 2,68 | 2,93 | 3,35 | 3,72 | 3,73 |
| Industri Pengolahan | 6,83 | 6,99 | 6,94 | 6,94 | 6,78 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Konstruksi | 9,88 | 10,22 | 9,56 | 9,60 | 8,67 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. | 12,16 | 11,90 | 11,14 | 10,98 | 11,53 |
| Transportasi dan Pergudangan | 2,30 | 2,33 | 2,39 | 2,53 | 2,25 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,49 |
| Informasi dan Komunikasi | 1,86 | 1,68 | 1,50 | 1,34 | 1,36 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,06 | 3,22 | 3,08 | 3,00 | 3,08 |
| Real Estate | 3,79 | 3,90 | 3,79 | 3,80 | 3,71 |
| Jasa Perusahaan | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,19 | 4,89 | 4,58 | 4,72 | 4,27 |
| Jasa Pendidikan | 2,43 | 2,48 | 2,35 | 2,23 | 2,12 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,84 |
| Jasa lainnya | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

Sumbangan terbesar pada tahun 2016, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Konstruksi industri perdagangan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 4,27 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone

Perekonomian Kabupaten Bone pada tahun 2016 meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone tahun 2016 sebesar 9,06 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 8,29 persen. Pertumbuhan ekonomi meningkat akibat dari meningkatnya lapangan usaha pertanian yaitu pada tahun 2015 pertumbuhannya sebesar 8,95 persen sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 10,62 persen, hal tersebut terjadi karena meningkatnya produksi padi dan jagung yang merupakan penopang sektor pertanian, Industri pengolahan dari 7,30 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,41 persen pada tahun 2016. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas juga meningkat dari -3,72 persen pada tahun 2015 menjadi 14,11 persen pada tahun 2016, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pertumbuhannya dari 0,47 persen meningkat menjadi 4,61 persen pada tahun 2016, begitu pula lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya mengalami peningkatan, Sedangkan lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang melambat,

apalagi lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami penurunan hingga -1,13 persen pada tahun 2016.

Tabel 5

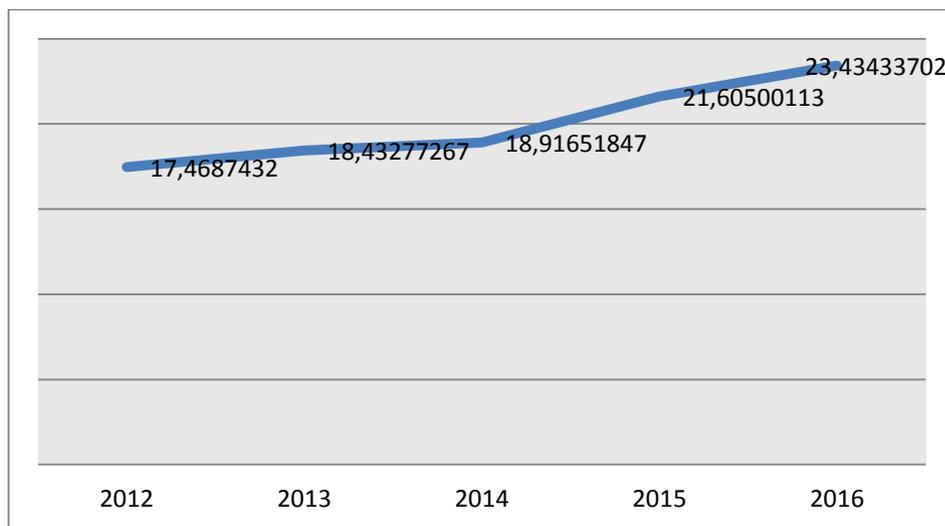
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bone Menurut lapangan Usaha
(persen) 2012-2016**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,20 | 4,16 | 13,31 | 8,95 | 10,62 |
| Pertambangan dan Penggalian | 14,57 | 10,74 | 14,35 | 13,69 | 10,50 |
| Industri Pengolahan | 7,73 | 7,13 | 8,12 | 7,30 | 8,41 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 26,11 | 1,30 | 22,37 | -3,72 | 14,11 |
| Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,40 | 4,79 | 0,08 | 0,47 | 4,61 |
| Konstruksi | 9,77 | 9,88 | 1,96 | 7,98 | 6,93 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. | 12,23 | 8,06 | 8,67 | 6,23 | 10,66 |
| Transportasi dan Pergudangan | 7,52 | 7,53 | 9,14 | 7,02 | 4,79 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,53 | 10,38 | 6,77 | 4,07 | 6,71 |
| Informasi dan Komunikasi | 14,46 | 11,28 | 3,06 | 10,44 | 10,84 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 15,17 | 10,70 | 5,61 | 7,71 | 13,09 |
| Real Estate | 9,90 | 5,52 | 7,54 | 7,38 | 2,47 |
| Jasa Perusahaan | 8,61 | 7,60 | 6,42 | 6,57 | 7,13 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,50 | 2,50 | 1,19 | 9,18 | -1,13 |
| Jasa Pendidikan | 10,26 | 9,65 | 5,11 | 6,52 | 7,31 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 27,05 | 18,10 | 9,49 | 7,66 | 7,67 |
| Jasa lainnya | 8,75 | 6,46 | 6,63 | 7,98 | 8,90 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 8,21 | 6,30 | 9,53 | 8,29 | 9,06 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

c. PDRB Perkapita Kabupaten Bone

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB perkapita Kabupaten Bone mencapai 23,43 juta Rupiah.



Gambar 5

PDRB Perkapita Kabupaten Bone (Rupiah), 2012–2016

2. Soppeng

Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500 km² yang terbagi ke dalam 8 wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Marioriwawo dengan luas 300 m² atau seperlima luas wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara 5-1.500 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan Citta ke ibu kota kabupaten Soppeng sejauh 35 km dan merupakan ibu kota kecamatan terjauh.

Kabupaten Soppeng dialiri 5 sungai antara lain Sungai Langkemme, Soppeng, Lawo, Paddangeng dan Lajaroko. Sementara gunung yang ada di Soppeng antara lain Gunung Nene Conang, Sewo, Lapancu, Pulpulu dan Paowengeng. Gunung tertinggi yaitu Gunung Nene Conang yang memiliki ketinggian puncak 1.463 meter.

a. Struktur Ekonomi Kabupaten Soppeng

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Soppeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Soppeng. Sumbangan terbesar pada tahun 2016, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar an Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kemudian Konstruksi dan Industri Pengolahan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 7 persen.

Tabel 6
Peranan PDRB kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha (Persen),
Tahun 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 30,07 | 30,07 | 30,33 | 28,41 | 30,2 |
| Pertambangan dan Penggalian | 3,22 | 3,45 | 3,91 | 4,19 | 4,57 |
| Industri Pengolahan | 9,07 | 9,48 | 10,16 | 10,65 | 10,37 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Konstruksi | 12,99 | 13,36 | 12,92 | 12,91 | 12,12 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. | 13,52 | 13,01 | 12,26 | 12,61 | 12,55 |
| Transportasi dan Pergudangan | 2,62 | 2,68 | 2,95 | 3,46 | 3,35 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,57 | 1,53 | 1,54 | 1,52 | 1,43 |
| Informasi dan Komunikasi | 3,26 | 3,26 | 2,88 | 2,72 | 2,75 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,40 | 3,45 | 3,44 | 3,43 | 3,49 |
| Real Estate | 5,04 | 5,26 | 5,44 | 5,62 | 5,60 |
| Jasa Perusahaan | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,65 | 7,15 | 7,02 | 7,32 | 6,57 |
| Jasa Pendidikan | 4,88 | 4,66 | 4,51 | 4,51 | 4,34 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,68 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,62 |
| Jasa lainnya | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,71 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Soppeng (data diolah)

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

Perekonomian Soppeng pada tahun 2016 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Soppeng tahun 2016 mencapai 8,24 persen per tahun, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,10 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh

lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,54 persen per tahun. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun lapangan usaha-lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan usaha Jasa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,48 persen per tahun, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,84 persen per tahun, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen per tahun, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,71 persen per tahun, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,63 persen per tahun, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,59 persen per tahun, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,85 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,62 persen per tahun, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,31 persen per tahun, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,00 persen per tahun, lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen per tahun, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,68 persen per tahun, lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,03 persen per tahun, lapangan usaha Real Estate sebesar 2,90 persen per tahun, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,46 persen per tahun, dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,55 persen per tahun.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Soppeng Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2012–2016

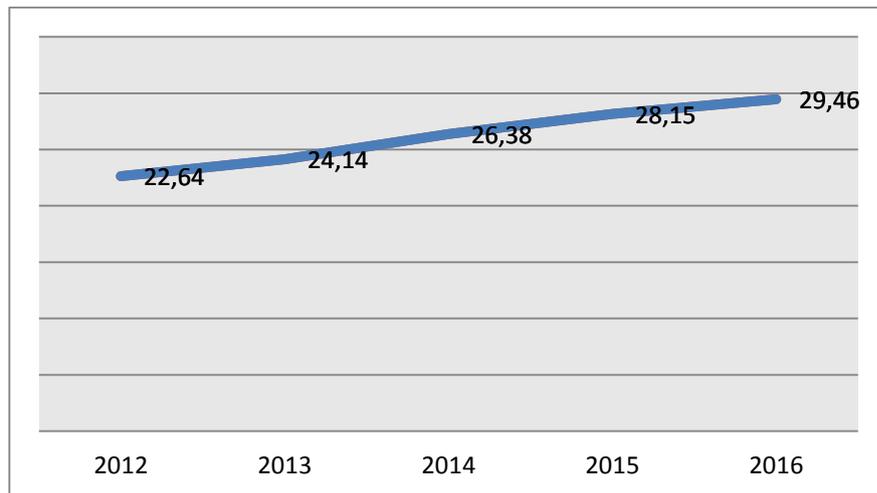
| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,06 | 2,89 | 7,54 | 1,48 | 11,48 |
| Pertambangan dan Penggalian | 10,13 | 7,14 | 9,42 | 4,78 | 10,84 |
| Industri Pengolahan | 9,89 | 17,07 | 11,77 | 6,54 | 6,68 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 13,48 | 8,01 | 5,54 | 7,95 | 8,31 |
| Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,41 | 7,97 | 1,07 | 0,52 | 2,46 |
| Konstruksi | 9,19 | 10,73 | 2,06 | 5,65 | 4,03 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. | 13,76 | 6,42 | 6,90 | 7,13 | 9,71 |
| Transportasi dan Pergudangan | 8,44 | 8,09 | 9,36 | 9,05 | 9,59 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,24 | 7,11 | 8,82 | 5,54 | 7,91 |
| Informasi dan Komunikasi | 14,06 | 17,02 | 0,65 | 10,43 | 10,53 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 17,94 | 6,59 | 9,45 | 5,63 | 11,54 |
| Real Estate | 9,59 | 10,27 | 12,62 | 7,89 | 2,90 |
| Jasa Perusahaan | 15,02 | 17,44 | 4,88 | 5,84 | 8,62 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,32 | 2,32 | 3,25 | 4,86 | 0,55 |
| Jasa Pendidikan | 3,92 | 8,10 | 5,29 | 5,77 | 9,63 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,51 | 4,45 | 8,44 | 9,17 | 8,85 |
| Jasa lainnya | 7,04 | 4,70 | 5,57 | 7,63 | 8,00 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Soppeng (data diolah)

c. PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Soppeng mencapai 24,54 juta Rupiah.



Gambar 6

PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng (Rupiah), 2012–2016

3. Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara $3^{\circ} 39' - 4^{\circ} 16' LS$ dan $119^{\circ} 53' - 120^{\circ} 27' BT$.

Luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%).

Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 Kecamatan. Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng.

- Sebelah Timur : Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap.

Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut :

- 0 – 7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %
- 8 – 25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 %
- 26 – 100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %
- 101 – 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 %
- di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.

a. Struktur Ekonomi

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kabupaten Wajo tahun 2012-2016 diperoleh angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Semakin besar persentase pembentukan PDRB suatu lapangan usaha semakin besar pula pengaruh lapangan usaha tersebut dalam perekonomian. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Lapangan usaha dalam pembentukan PDRB dibagi menjadi tiga kelompok yaitu primer meliputi pertanian dan penggalian; sekunder meliputi industri pengolahan, listrik gas air dan bangunan; serta tersier yang terdiri atas perdagangan, transportasi dan jasa.

Tabel 9

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Wajo, 2012-2016 (persen)

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 32,28 | 32,02 | 32,53 | 32,97 | 34,55 |
| Pertambangan dan Penggalian | 22,07 | 21,88 | 22,70 | 20,36 | 17,29 |
| Industri Pengolahan | 3,46 | 3,44 | 3,43 | 3,60 | 3,71 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Konstruksi | 8,46 | 9,12 | 8,94 | 9,46 | 9,58 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,80 | 14,06 | 13,34 | 13,62 | 14,76 |
| Transportasi dan Pergudangan | 2,87 | 2,96 | 3,02 | 3,31 | 3,20 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| Informasi dan Komunikasi | 1,51 | 1,52 | 1,36 | 1,30 | 1,34 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,34 | 2,41 | 2,29 | 2,34 | 2,53 |
| Real Estate | 2,71 | 3,02 | 3,11 | 3,31 | 3,41 |
| Jasa Perusahaan | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,16 | 4,03 | 3,83 | 4,13 | 3,87 |
| Jasa Pendidikan | 3,23 | 3,37 | 3,24 | 3,32 | 3,40 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 |
| Jasa lainnya | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,41 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Wajo (data diolah)

Periode 2012 hingga 2016 struktur perekonomian Kabupaten Wajo masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Wajo adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut merupakan

lapangan usaha utama yang mampu menyerap sebanyak 46 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Wajo. (Sakernas, BPS 2015)

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Wajo tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya selama tahun 2012 hingga 2016. Hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Wajo. Sumbangan terbesar pada tahun 2016, sama seperti tahun-tahun sebelumnya dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran dan konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dari nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB yang digunakan merupakan nilai PDRB atas dasar harga konstan, dengan mengeluarkan pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Apabila dicermati dari tahun 2012 hingga 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo terlihat fluktuatif dalam kisaran 4 hingga 10 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai besaran 9,67 persen pertahun. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo ini sangat dipengaruhi oleh peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo merupakan daerah agraris yang menonjolkan pertanian sebagai pilar utama ekonomi atau dapat dikatakan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Wajo tergantung pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Perekonomian Wajo pada tahun 2016 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2015. Laju pertumbuhan PDRB Wajo tahun 2016 tercatat 4,98 persen per tahun. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan perubahan ekonomi tahun 2015 sebesar 7,05 persen per tahun. Melambatnya ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2016 disebabkan oleh kontraksi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian hingga minus 6,16 persen per tahun sebagai dampak dari produksi gas alam tahun 2016 yang turun drastis sebesar 7,72 persen dibanding tahun 2015. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena share lapangan usaha Pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Wajo tergolong cukup besar.

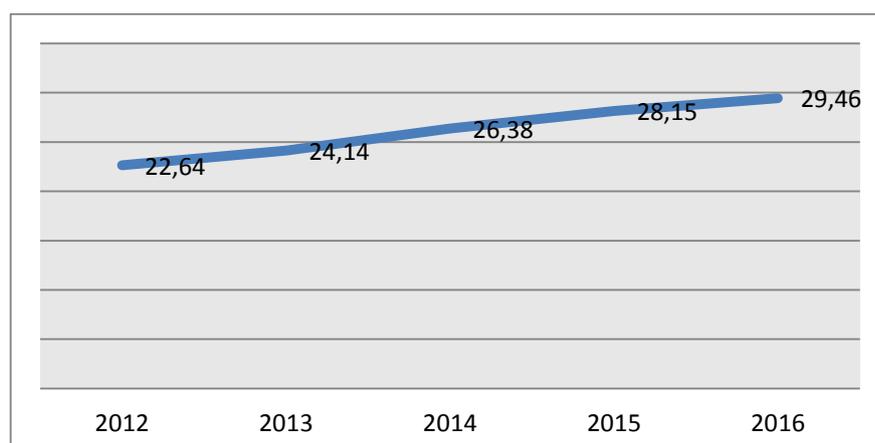
Disamping itu, melambatnya ekonomi Kabupaten Wajo juga dipengaruhi oleh kontraksi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan sub lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau. Kebijakan pemerintah bertajuk penghematan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2016 mengakibatkan kontraksi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintah sebesar minus 1,25 persen. Hal serupa juga terjadi pada sub lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau. Industri Pengolahan Tembakau tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif hingga minus 3,32 persen sebagai dampak dari produksi tembakau yang menurun tajam sebesar 72 persen dibanding produksi tahun 2015.

Namun demikian, lapangan usaha Pertanian sebagai penopang utama perekonomian di Kabupaten Wajo mampu menahan gejolak pertumbuhan negatif lapangan usaha lain. Tahun 2016, lapangan usaha pertanian yang didominasi oleh pertanian tanaman pangan mampu mendorong ekonomi Wajo sebesar 9,82

persen. Kondisi iklim dan intensitas hujan di Kabupaten Wajo tahun 2016 lebih baik dibanding tahun 2015, yang berdampak positif meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditi utama tanaman pangan. Selain Pertanian, lapangan usaha Jasa keuangan, Informasi dan Komunikasi dan Perdagangan juga ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2016 masing-masing sebesar 15,38 persen, 9,36 persen dan 8,96 persen per tahun.

c. PDRB Perkapita Kabupaten Wajo

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dari gambar7 dibawah ini terlihat perkembangan besaran PDRB per kapita Kabupaten Wajo selama periode 2012 hingga 2016. Dalam waktu 5 tahun dari 2012 hingga 2016, PDRB perkapita Kabupaten Wajo naik. Tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Wajo berada pada angka 22,64 juta rupiah naik mencapai 29,46 juta rupiah pada tahun 2016.



Gambar 7

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo (Rupiah), 2012–2016

B. Analisis Deskriptif

1) Pertumbuhan dan Peranan PDRB Kabupaten Bone

PDRB Kabupaten Bone menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sub lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup Sublapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar adalah pada sub lapangan usaha peternakan yaitu sebesar 13,64 persen yang diikuti oleh sub lapangan usaha tanaman pangan sebesar 11,26 persen, menyusul lapangan usaha perikanan sebesar 10,96 persen. Sedangkan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya mencetak laju pertumbuhan yang positif di atas 4 persen. Berturut-turut lapangan usaha jasa pertanian dan perburuan, perkebunan tahunan, tanaman hortikultura tahunan lainnya, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, hanya lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu yang mengalami resesi ekonomi sampai -2,02 persen.

Tabel 11

**Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pertanian,
Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen), 2012-2016**

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 60,5 | 57,4 | 56,0 | 56,3 | 60,5 |
| a. Tanaman Pangan | 37,2 | 34,9 | 34,5 | 35,1 | 37,2 |
| b. Tanaman Hortikultura semusim | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| c. Tanaman Perkebunan semusim | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| d. Tanaman hortikultura Tahunan dan lainnya | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| e. Perkebunan Tahunan | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 13,0 |
| f. Peternakan | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 13,0 |
| g. Jasa Pertanian dan Perburuan | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
| 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 Perikanan | 39,2 | 42,4 | 43,8 | 43,6 | 39,2 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Wajo (data diolah)

b) Pertambangan dan Penggalan

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan di Kabupaten Bone hanya di topang oleh sub lapangan usaha penggalan saja. Laju pertumbuhan Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan berfluktuatif dalam periode tahun 2012-2016 yaitu pada tahun 2012 pertumbuhannya 14,57 persen, mengalami perlambatan tahun 2013 yaitu 10,74 persen, tahun 2014 mengalami percepatan lagi 14,35 persen, pada tahun 2015 melambat 13,69 persen dan pada tahun 2016 melambat menjadi 10,50 persen. Sedangkan kontribusinya meningkat dari dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2011 kontribusinya 2,55.

Kontribusi tersebut terus meningkat pada tahun 2012, 2013, 2014 masing-masing menjadi 2,68 persen, 2,93 persen, 3,34 persen serta meningkat lagi tahun 2015 menjadi 3,74 persen.

Tabel 12

Peranan dan pertumbuhan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | | Tahun | | | | |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Peranan | 2,68 | 2,93 | 3,35 | 3,72 | 3,73 |
| 2 | Pertumbuhan | 14,57 | 10,74 | 14,35 | 13,69 | 10,50 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

c) Industri Pengolahan

Pada Kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar terhadap PDRB adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 5,21 persen pada tahun 2016.

Tabel 13
Peranan Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB kategori
Industri Pengolahan (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Industri Batubara dan Pengilangan Migas | - | - | - | - | - |
| Industri Makanan dan Minuman | 70,24 | 70,93 | 73,62 | 75,69 | 76,80 |
| Industri Pengolahan Tembakau | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,40 |
| Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,15 |
| Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,57 | 0,54 |
| Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya | 7,45 | 6,83 | 6,37 | 5,75 | 5,56 |
| Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,39 | 1,12 |
| Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 0,56 | 0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,43 |
| Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Industri Barang Galian bukan Logam | 10,23 | 10,58 | 9,37 | 8,56 | 8,36 |
| Industri Logam Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik | 7,42 | 7,17 | 6,45 | 6,06 | 5,80 |
| Industri Mesin dan Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industri Alat Angkutan | 0,54 | 0,49 | 0,42 | 0,39 | 0,32 |
| Industri Furnitur | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,39 |
| Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| Industri Pengolahan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

Sedangkan Peranan Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar terhadap PDRB adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 76,80 persen pada tahun 2016. kemudian diikuti oleh Industri Barang Galian bukan Logam 8,36 persen.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2016 adalah sebesar 8,41 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri kayu, barang dari kayu dan gabus yaitu sebesar 11,63 persen pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh, industri makanan dan minuman sebesar 9,22 persen, kemudian industri bukan logam 7,90 persen, industri kulit dan barang dari kulit dan alas kaki sebesar 7,18 persen, sedangkan industri selain yang disebutkan pertumbuhannya dibawah 6 persen dan ada juga yg mengalami resesi ekonomi.

d) Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,07 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bone pada tahun 2016. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 91,60 persennya disumbangkan oleh lapangan usaha Ketenagalistrikan, dan 8,40 persen oleh Pengadaan Gas dan Produksi Es.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini mengalami percepatan sebesar - 14,11 persen pada tahun 2016. Masing-masing lapangan usaha juga mencatatkan pertumbuhan, di mana lapangan usaha Ketenagalistrikan sebesar 14,61 persen dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 6,14 persen.

Tabel 14
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ketenagalistrikan | 93,55 | 92,50 | 92,32 | 90,80 | 91,56 |
| Pengadaan Gas dan Produksi Es | 6,45 | 7,50 | 7,68 | 9,20 | 8,44 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bone selama tahun 2012-2013 sebesar 0,05 persen, pada tahun 2014 ada pergeseran sehingga hanya 0,04 persen, begitu pula untuk tahun 2015-2016 hanya 0,03 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 3,40 persen, 4,79 persen, 0,08 persen, 0,47 persen dan 4,61 berturut-turut untuk tahun 2012-2016.

f) Konstruksi

Pada tahun 2016 lapangan usaha konstruksi menyumbang sebesar 9,67 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bone meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 9,60 persen. Trend kontribusi lapangan usaha konstruksi juga terlihat pada periode tahun 2012-2016 yaitu tahun 2012 sebesar 9,88 persen, tahun 2013 sebesar 10,22 persen, pada tahun 2014 sebesar 9,56 persen, pada tahun 2015 sebesar 9,60 persen dan pada tahun 2016 sebesar 9,67

persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Bone tahun 2016 sebesar 6,93 persen.

g) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 10 persen. Pada tahun 2016, kontribusi lapangan usaha ini sebesar 11,53 persen, dengan sebesar 3,29 persen (28,54 persen terhadap lapangan usaha) disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Sedangkan sebesar 8,24 persen (71,46 persen terhadap lapangan usaha) disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 15

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | 30,38 | 31,73 | 30,91 | 30,52 | 28,54 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | 69,62 | 68,27 | 69,09 | 69,48 | 71,48 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

h) Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.

Tabel 15
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Angkutan Rel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angkutan Darat | 73,53 | 75,15 | 73,93 | 76,55 | 75,43 |
| Angkutan Laut | 4,63 | 4,37 | 4,81 | 4,60 | 4,83 |
| Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | 20,78 | 19,35 | 20,29 | 17,96 | 18,77 |
| Angkutan Udara | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir | 1,07 | 1,05 | 0,90 | 0,81 | 0,90 |
| Transportasi dan Pergudangan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

Lapangan usaha Angkutan darat memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap lapangan usaha ini sebesar 75,43 persen pada tahun 2016. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 18,77 persen dan angkutan laut sebesar 4,83 persen.

i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bone sebesar 0,49 persen, di mana sebesar 0,44 persennya (89,02 persen terhadap lapangan usaha) merupakan kontribusi dari lapangan usaha Penyediaan Makan Minum dan sebesar 0,05 persen (10,98 persen terhadap lapangan

usaha) disumbangkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi. Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 6,71 persen pada tahun 2016.

Tabel 16
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Penyediaan Akomodasi | 12,42 | 12,30 | 11,37 | 10,82 | 10,98 |
| Penyediaan Makan Minum | 87,58 | 87,70 | 88,63 | 89,18 | 89,02 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

j) Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas disetiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bone selama tahun 2012-2016 sebesar 1,86 persen, 1,68 persen, 1,50 persen, 1,34 persen dan 1,36 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2016 sebesar 10,84 persen.

k) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2012-2016, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 54 persen terhadap PDRB lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya adalah lapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya pada kisaran di atas 31 persen, Asuransi dan Dana Pensiun dengan sumbangan sekitar 5 persen, dan terakhir adalah

JasaPenunjang Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap lapangan usaha ini sekitar 1 persen.

Tabel 17
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012-2016

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Jasa Perantara Keuangan | 60,70 | 58,72 | 56,37 | 54,91 | 56,20 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 6,01 | 5,89 | 6,09 | 6,16 | 5,94 |
| Jasa Keuangan Lainnya | 31,69 | 33,76 | 35,85 | 37,29 | 36,30 |
| Jasa Penunjang Keuangan | 1,61 | 1,63 | 1,70 | 1,64 | 1,56 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bone (data diolah)

l) Real Estate

Lapangan usaha real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB KabupatenBone dengan peranan sebesar kurang dari 4 persen. Selama tahun 2012-2016, secara berturut-turut sumbangan lapangan usaha real estate sebesar 3,79 persen, 3,90 persen, 3,79 persen, 3,80 persen dan 3,71 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini berfluktuasi sepanjang tahun 2012-2016 yaitu berkisar 9,90 persen, 5,52 persen, 7,54 persen, 7,38 persen dan 2,47 persen.

m) Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perusahaan yaitu 0,07 dari tahun 2012-2013, akan tetapi pada tahun 2014-2016 mengalami pergeseran yaitu 0,06 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan lapangan usaha ini relatif kecil dibandingkan peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya pada perekonomian Kabupaten Bone, sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2016 sebesar 7,13 persen.

n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012-2016 peranannya pada kisaran 4-5 persen, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 5,19 persen, 4,89 persen, 4,58 persen, 4,72 persen dan 4,27 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2016 mengalami resesi ekonomi -1,13 persen.

o) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 2,12 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bone, menurun dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 2,23 persen. Kontribusi lapangan usaha ini juga terlihat sedikit berfluktuasi pada tahun 2012-2014 yaitu sebesar berturut-turut 2,43 persen, 2,48 persen dan 2,35 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Bone sebesar 7,31 persen pada tahun 2016..

p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Bone sebesar 0,84 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 7,67 persen. Selama tahun 2013-2015 peranannya stagnan yaitu 0,86 dan pada tahun 2016 kontribusinya hanya 0,84 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2016 sebesar 7,67 persen.

q) Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Bone relatif kecil yaitu berturut-turut 0,33 persen pada tahun 2012-2013, 0,33 persen pada tahun 2014-2016 dan 0,32 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya sebesar 8,90 persen pada tahun 2016.

2) Pertumbuhan dan Peranan PDRB Kabupaten Soppeng

PDRB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup Sublapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sublapangan Usaha kehutanan dan Penebaran Kayu, dan Sublapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 28,41 persen. Sublapangan usaha tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 55,70 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Pertumbuhan sublapangan usaha ini mengalami kenaikan dari (1,08) persen pada tahun 2015 menjadi 14,00 persen pada tahun 2016. Kontribusi Sublapangan usaha jasa pertanian dan perburuan terhadap total PDRB pada tahun 2016 menurun menjadi 1,75 persen dibanding tahun 2015 sebesar 1,89 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 pada kategori ini terbesar adalah pada lapangan usaha Tanaman Pangan yaitu sebesar 14,00 persen per tahun yang diikuti oleh lapangan usaha Perikanan sebesar 13,76 persen per tahun. Sementara itu, lapangan usaha-lapangan usaha lainnya ada yang mengalami laju pertumbuhan yang positif dan negatif. Berturut-turut lapangan usaha Perkebunan, Tanaman Hortikultura, Jasa Pertanian dan Perburuan, Peternakan, serta Kehutanan dan Penebangan Kayu mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar 13,6 persen per tahun, 11,20 persen per tahun, 10,85 persen per tahun, 5,50 persen per tahun, dan (0,88)persen per tahun.

b) Pertambangan dan Penggalian

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Lainnya yaitu sebesar 4,57 persen pada tahun 2016, naik dari 4,19 persen di tahun 2015. Secara keseluruhan pada tahun 2016, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan laju pertumbuhan yang positif.

c) Industri Pengolahan

Pada Kategori Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 7,28 persen pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Barang dari Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, sebesar 1,82 persen dan 0,54 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain berturut-turut mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah lapangan usaha Pengolahan Tembakau sebesar 0,52 persen, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 0,11 persen, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 0,04

persen, Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 0,02 persen, Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri Logam Dasar 0,02 persen, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0,01 persen, serta Industri Furnitur sebesar 0,01 persen.

Secara keseluruhan, laju per umbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2016 adalah sebesar 6,68 persen per tahun, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 9,06 persen per tahun pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 9,03 persen per tahun dan 8,09 persen per tahun.

d) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,08 persen terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng pada tahun 2016. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 98,50 persennya disumbangkan oleh lapangan usaha Ketenagalistrikan, dan 1,50 persen oleh Pengadaan Gas dan Produksi Es. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2016 adalah sebesar 8,31 persen per tahun. Masing-masing lapangan usaha juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2016, di mana lapangan usaha Ketenagalistrikan sebesar 8,33 persen per tahun dan Pengadaan Gas dan Produksi Es sebesar 6,60 persen per tahun.

e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga

dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng selama tahun 2011-2016 sebesar 0,07 persen; 0,06 persen; 0,06 persen; 0,05 persen; 0,05 persen; dan 0,04 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya, yaitu sebesar 11,88 persen, 0,41 persen, 7,79 persen, 1,07 persen, 0,52 persen, dan 2,48 persen berturut-turut untuk tahun 2011-2016.

f) Konstruksi

Pada tahun 2016 kategori konstruksi menyumbang sebesar 12,12 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Soppeng, menurun dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 12,91 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2011-2014) yaitu sebesar berturut-turut 12,33 persen, 12,99 persen, 13,36 persen, dan 12,92. Dengan penghitungan atas dasar arga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Soppeng mengalami perlambatan dari 5,65 persen pada tahun 2015 menjadi 4,03 persen pada tahun 2016.

g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 12 persen. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini sebesar 12,55 persen, dengan sebesar 4,85 persen (38,64 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Sedangkan sebesar 7,71 persen (61,36 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

h) Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Lapangan usaha Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 98,49 persen pada tahun 2016. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan sebesar 1,51 persen pada tahun 2016.

i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,43 persen, di mana sebesar 1,40 persennya (97,46 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari lapangan usaha Penyediaan Makan Minum dan sebesar 0,04 persen (2,54 persen terhadap kategori) disumbangkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,91 persen pada tahun 2016, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 5,54 persen per tahun. Masing-masing lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2016 sebesar 9,83 persen per tahun dan 7,87 persen per tahun.

j) Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten

Soppeng selama tahun 2011-2016 sebesar 2,89 persen; 3,26 persen; 3,26 persen; 2,88 persen; 2,72 persen; dan 2,75 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 13,08 persen; 14,06 persen, 17,02 persen, 0,65 persen dan 10,43 persen pada masing masing tahun 2011-2015, dan mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 10,53 persen.

k) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2011-2016, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 62,43 persen terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya adalah lapangan usaha Jasa Keuangan lainnya sebesar 32,16 persen, Asuransi dan Dana Pensiun dengan sumbangan sebesar 4,41 persen, dan terakhir adalah Jasa Penunjang Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 1,01 persen.

l) Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif meningkat bagi PDRB Kabupaten Soppeng dengan peranan sebesar lebih dari 4 persen. Selama tahun 2011-2016, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar 4,79 persen; 5,04 persen; 5,26 persen; 5,44 persen, 5,62 persen; dan 5,60 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini selalu positif sepanjang tahun 2011-2016 yaitu berkisar 9,92 persen per tahun; 9,59 persen per tahun; 10,27persen per tahun; 12,62 persen per tahun, 7,89 persen r tahun dan 2,90 persen per tahun.

m) Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,20 persen pada tahun 2011, menjadi 0,20 persen, 0,20 persen, 0,20 persen, 0,20 persen, dan 0,20 persen untuk tahun 2011-2016. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Soppeng. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami kenaikan dari 5,84 persen pada tahun 2015 menjadi 8,62 persen pada tahun 2016.

n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2011-2016 peranannya tidak mengalami banyak perubahan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 7,98 persen, 7,65 persen, 7,15 persen, 7,02 persen, 7,32 persen dan 6,57 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan tren perlambatan, yaitu dari sebesar 4,86 persen di tahun 2015 menjadi 0,55 persen di tahun 2016.

o) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,34 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Soppeng, menurun dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 4,51 persen. Kontribusi kategori ini juga terlihat sedikit berfluktuasi pada tahun 2011-2014 yaitu sebesar berturut-turut 5,79 persen, 4,88 persen, 4,66 persen, dan 4,51 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2016, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Soppeng

mengalami percepatan dari 5,77 persen pada tahun 2015 menjadi 9,63 persen pada tahun 2016.

p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng sebesar 1,62 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,85 persen. Selama tahun 2011-2015 peranannya menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,72 persen, 1,68 persen, 1,61 persen, 1,62 persen, dan di tahun 2015 naik menjadi 1,63 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu di atas 7 persen per tahun.

q) Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Soppeng relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2011-2016 sebesar 0,67 persen; 0,66 persen; 0,66 persen; 0,67 persen; 0,71 persen dan 0,71 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dan lebih dari 6 persen, yaitu 6,54 persen; 7,04 persen; 4,07 persen; 5,57 persen; 7,63 persen; dan 8,00 persen sepanjang tahun 2011-2016.

3) Pertumbuhan dan Peranan PDRB Kabupaten Wajo

PDRB Kabupaten Wajo menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Tabel 18
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo, 2012-2016 (persen)

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7,45 | 6,82 | 10,17 | 4,79 | 9,82 |
| Pertambangan dan Penggalian | (3,25) | 2,32 | 15,98 | 9,27 | (6,16) |
| Industri Pengolahan | 7,36 | 8,14 | 5,20 | 6,86 | 7,79 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 8,72 | 12,83 | 6,58 | 10,96 | 6,04 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,25 | 0,55 | 4,01 | 0,82 | 3,37 |
| Konstruksi | 16,29 | 11,96 | 5,70 | 7,75 | 6,08 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,39 | 5,35 | 8,00 | 7,03 | 8,96 |
| Transportasi dan Pergudangan | 9,41 | 9,56 | 8,37 | 6,31 | 5,36 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,75 | 11,21 | 8,48 | 6,93 | 7,69 |
| Informasi dan Komunikasi | 13,15 | 14,64 | 4,44 | 9,96 | 9,36 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 16,43 | 10,71 | 4,79 | 7,85 | 15,38 |
| Real Estate | 14,12 | 16,33 | 10,18 | 8,53 | 6,57 |
| Jasa Perusahaan | 15,57 | 17,01 | 6,50 | 5,46 | 7,76 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,13 | 6,55 | 2,41 | 7,48 | (1,25) |
| Jasa Pendidikan | 9,68 | 12,03 | 4,79 | 8,14 | 7,62 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,11 | 12,18 | 10,68 | 7,66 | 7,80 |
| Jasa lainnya | 8,06 | 8,34 | 7,34 | 7,11 | 8,63 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 6,50 | 6,92 | 9,67 | 7,05 | 4,98 |

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Wajo (data diolah)

a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbagi menjadi sub lapangan usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu dan sub lapangan usaha perikanan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha penopang perekonomian di Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, yakni sebesar 34,55 persen. Bahkan dalam tiga tahun terakhir peranan kategori ini terhadap PDRB cenderung naik, yang membuktikan kategori ini adalah penggerak utama ekonomi di Kabupaten Wajo.

Pertumbuhan riil tahun 2016 pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat sebesar 9,82 persen atau naik dua kali lipat dibanding pertumbuhan tahun 2015.

Pertumbuhan positif kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2016 ini didorong oleh pertumbuhan sub lapangan usaha tanaman pangan yang mencapai 11,05 persen serta sub lapangan usaha perikanan yang mampu tumbuh sebesar 9,07 persen. Tingginya pertumbuhan sub lapangan usaha tanaman pangan tahun 2016 dipengaruhi oleh kenaikan produksi komoditi padi sebesar 13,97 persen dan komoditi jagung sebesar 5,27 persen dibanding tahun 2015. Kondisi iklim dan intensitas curah hujan yang cukup sepanjang tahun 2016 berpengaruh terhadap kenaikan produksi kedua komoditi unggulan tanaman pangan tersebut.

b) Pertambangan dan Penggalian

Peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terhadap total PDRB Kabupaten Wajo merupakan yang terbesar kedua setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tercatat dari tahun 2012 hingga 2016 lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Wajo. Tahun 2016 peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 17,29 persen dari total PDRB Kabupaten Wajo. Keberadaan tambang gas bumi di Kabupaten Wajo memberikan andil terbesar dalam pembentukan nilai tambah lapangan usaha ini. Terlebih mulai tahun 2014 sebagian masyarakat Kabupaten Wajo telah dapat menikmati gas kota sebagai bahan bakar rumah tangga.

Dalam tiga tahun terakhir, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menunjukkan pertumbuhan yang cenderung melambat. Bahkan pada tahun 2016 lapangan usaha ini mengalami kontraksi yang ditandai dengan pertumbuhan negatif hingga minus 6,16 persen. Hal tersebut diakibatkan oleh sub lapangan usaha pertambangan gas bumi yang mengalami kontraksi pertumbuhan hingga menembus angka minus 7,47 persen. Penurunan kinerja sub lapangan usaha pertambangan gas bumi merupakan dampak dari penurunan volume produksi gas alam sebesar 7,72 persen. Namun disisi lain, sub lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Lainnya mampu menahan kontraksi lapangan usaha ini dengan pertumbuhan sebesar 8,14 persen. Terjadinya kontraksi pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini menjadi faktor penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2016.

c) Industri Pengolahan

Selama tahun 2012-2016, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sekitar 3 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Lapangan usaha ini ditopang oleh industri makanan dan minuman yang cukup beragam di Kabupaten Wajo.

Secara keseluruhan, kategori Industri Pengolahan pada periode tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan positif dengan kecenderungan naik per tahunnya. Tahun 2016 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 7,79 persen, naik dibanding tahun 2015 yang tercatat 7,13 persen per tahun. Peningkatan laju pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan tahun 2016 didorong oleh pertumbuhan industri makanan minuman yang mencapai 8,53 persen.

d) Pengadaan Listrik dan Gas

Selama periode tahun 2012-2016, peranan kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkisar antara 0,06 persen hingga 0,09 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Meskipun laju pertumbuhan kategori ini di Provinsi Sulawesi Selatan sempat mengalami kontraksi namun di Kabupaten Wajo justru mampu tumbuh positif hingga 6,04 persen per tahun. Pertumbuhan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan listrik yang naik signifikan dari tahun sebelumnya akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat baik rumah tangga, pemerintah maupun swasta akan pasokan listrik.

e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian

peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini selama tahun 2012-2016 hanya sebesar 0,03 hingga 0,04 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016 kategori ini mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,37 persen per tahun. Angka ini relatif naik jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 0,82 persen. Kenaikan pertumbuhan lapangan usaha ini didorong oleh kenaikan produksi air bersih setelah beroperasinya pompa air tambahan.

f) Konstruksi

Pada tahun 2016 kategori konstruksi menyumbang sebesar 9,58 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Wajo, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 8,46 persen. Tren peningkatan peranan lapangan usaha ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2014-2015) yaitu berturut-turut sebesar 8,94 dan 9,46 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Wajo melambat dari 7,75 persen pada tahun 2015 menjadi 6,08 persen pada tahun 2016 yang mengindikasikan bahwa pembangunan fisik pada tahun 2016 kurang dibanding tahun 2015. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan konstruksi tahun ini disebabkan oleh penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah khususnya pada pos anggaran belanja modal.

g) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan share tertinggi ketiga, dengan kisaran angka antara 13 hingga 14 persen terhadap total nilai tambah Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini mencapai 14,76 persen dari total PDRB. Perdagangan besar dan eceran yang cukup berkembang mempengaruhi

besarnya peranan kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Wajo. Laju pertumbuhan kategori ini tercatat naik dari 7,03 persen pada tahun 2015 menjadi 8,96 persen pada tahun 2016. Naiknya volume perdagangan tahun 2016 dipengaruhi oleh membaiknya kinerja lapangan usaha pertanian, karena arus perputaran ekonomi perdagangan di masyarakat Wajo lebih bertumpu pada lapangan usaha tersebut.

h) Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Pada tahun 2016 kategori ini memberikan kontribusi sebesar 3,20 persen terhadap total PDRB Wajo dan 80 persen diantaranya bersumber dari nilai tambah Angkutan Darat. Meskipun menunjukkan tren perlambatan selama 2012-2016, Kategori ini mampu tumbuh positif hingga 5,36 persen pada tahun 2016.

i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Wajo sebesar 0,32 persen, dimana 80 persennya disumbang dari penyediaan makan minum. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,69 persen pada tahun 2016, naik dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 6,93 persen.

j) Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terut ma jasa

telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Wajo selama tahun 2012-2016 tercatat sekitar 1,3 persen. Sedangkan pertumbuhan riil kategori informasi dan komunikasi tahun 2016 menjadi yang tertinggi ketiga dari seluruh kategori komponen pembentuk PDRB yaitu sebesar 9,36 persen per tahun.

k) Jasa Keuangan dan Asuransi

Selama periode tahun 2012-2016 kategori jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 2,34 persen, 2,41 persen, 2,29 persen, 2,34 persen dan 2,53 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perantara keuangan merupakan penyumbang terbesar pada kategori ini. Selama tahun 2012-2015, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 70 persen terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Tahun 2016, pertumbuhan kategori ini menjadi yang tertinggi diantara pembentuk komponen PDRB. Kategori jasa keuangan mampu tumbuh positif hingga 15,38 persen pada tahun 2016.

l) Real Estat

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Wajo dengan peranan antara 2 hingga 3 persen dari total nilai PDRB. Selama tahun 2012-2016, secara berturut-turut sumbangan kategori real estate sebesar 2,71 persen, 3,02 persen, 3,11 persen, 3,31 persen dan 3,41 persen. Meskipun share terhadap total PDRB tergolong kecil, kategori ini mencatatkan pertumbuhan yang cukup besar di setiap tahunnya selama 2012-2016. Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2016 sebesar 6,57 persen per tahun, melambat dibanding tahun 2015 yang mencapai 8,53 persen.

m) Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegi tan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah dalam kisaran 0,09 hingga 0,11 persen terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori -kategori lainnya pada perekonomian Wajo. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2016 tercatat meningkat mencapai 7,76 persen dibanding tahun 2015.

n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012-2016 peranannya tidak mengalami banyak perubahan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 4,16 persen, 4,03 persen, 3,83 persen, 4,13 persen dan 3,87 persen. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami kontraksi hingga minus 1,25 persen pada tahun 2016. Fenomena tersebut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah berupa penghematan anggaran pada pertengahan tahun 2016, yang berimbas pada turunnya realisasi belanja pemerintah.

o) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 3,40 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo, naik dibandingkan tahun 2012 sebesar 3,23 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Wajo meningkat dari 4,79 persen pada tahun 2014 menjadi 7,62 persen pada tahun 2016.

p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2012-2016 peranan kategori ini relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi tahun 2012 hingga 2016 berturut-turut sebesar 1,22 persen, 1,27 persen, 1,32 per en, 1,37 persen dan 1,43 persen dari total PDRB Wajo. Sedangkan laju pertumbuhannya selama 2012-2016 tercatat cukup tinggi, dalam kisaran 7 hingga 12 persen per tahun. H I tersebut mengindikasikan jasa kesehatan di Kabupaten Wajo bertumbuh positif sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan akan jasa kesehatan.

q) Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Wajo relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2012-2016 yaitu sekitar 0,37 persen hingga 0,41 persen dari total PDRB Wajo. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu bernilai positif dan lebih dari 7 persen per tahun, bahkan mencapai 8,63 persen pada tahun 2016.

4) Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk memungkinkan penambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Selanjutnya, penambahan penduduk dan pemberian pendidikan kepada mereka sebelum menjadi tenaga kerja, memungkinkan sesuatu masyarakat memperoleh bukan saja tenaga kerja yang ahli, akan tetapi juga tenaga kerja terampil, terdidik, dan *entrepreneur* yang berpendidikan. Namun Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan adanya kedua keadaan ini penambahan penduduk tidak akan menaikkan

produksi secara signifikan. Yang lebih buruk lagi masalah pengangguran akan menjadi bertambah serius. (Sukirno, 2006)

Tabel 19
Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 728,737 | 734,119 | 783,515 | 742,912 | 746,973 |
| Soppeng | 226,202 | 225,512 | 225,709 | 226,116 | 226,305 |
| Wajo | 389,552 | 390,603 | 391,980 | 393,218 | 394,495 |
| Jumlah | 1,344,491 | 1,350,234 | 1,401,204 | 1,362,246 | 1,367,773 |

Sumber : BPS Sulawesi Selatan (data diolah)

Jumlah penduduk dapat kita lihat pada tabel 19 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali di kabupaten Bone pada tahun 2015 mengalami pengurangan jumlah penduduk.

C. Hasil Penelitian

1. Kesenjangan Ekonomi

Alat analisis yang digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten yang terjadi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo adalah Indeks Entropi Theil. Rumus indeks ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika angka indeks sama dengan nol maka menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi di kabupaten tersebut. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi di kabupaten tersebut. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomidi kabupaten tersebut. Dari hasil perhitungan Indeks Entropi Theil tiap kabupaten Bone,

Soppeng dan Wajo selama periode tahun 2012-2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 20
Hasil Perhitungan Tingkat Kesenjangan Ekonomi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Periode 2012-2016

| Kabupaten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata-rata |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Bone | 0.20479 | 0.19968 | 0.17470 | 0.20403 | 0.21119 | 0.19888 |
| Soppeng | 0.75115 | 0.76930 | 0.80376 | 0.72988 | 0.74259 | 0.75934 |
| Wajo | 0.71899 | 0.72465 | 0.79147 | 0.73108 | 0.70302 | 0.73384 |

Sumber : Data diolah menggunakan Indeks Entropi Theil

Tabel 20 menunjukkan rata-rata angka indeks tiap kabupaten selama periode 2012-2016 penelitian berkisar antara 0,17470 sampai dengan 0.80376. Dimana tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Soppeng dengan rata-rata angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,75934 dan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Wajo dengan angka sebesar 0,73384. Sementara posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Bone dengan rata-rata angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,19888.

Tahun 2012 tingkat kesenjangan yang paling besar adalah Kabupaten Soppeng dengan angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,75115 dan urutan terendah dalam angka Indeks Entropi Theil berada pada Kabupaten Bone dengan angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,20479. Untuk tahun 2013 tingkat kesenjangan yang berada di urutan tertinggi adalah Kabupaten Soppeng dengan angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,76930 dan Kabupaten Bone berada pada urutan terendah diantara kabupaten lainnya dalam Indeks Entropi Theil sebesar 0,19968. Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan yang tertinggi berada pada Kabupaten Soppeng dengan angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,80376 dan

Kabupaten Bone yang menempati urutan terendah dalam angka Indeks Entropi Theil yakni sebesar 0,17470. Selanjutnya pada tahun 2015 tingkat kesenjangan diurutan tertinggi berada pada Kabupaten Wajo dengan angka Indeks Entropi Theilnya sebesar 0,73108 dan tingkat kesenjangan terendah berada pada Kabupaten Bone dengan angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,20403. Kemudian pada tahun 2016 tingkat kesenjangan tertinggi berada pada Kabupaten Soppeng dengan angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,74259 dan Kabupaten Bone memiliki tingkat kesenjangan yang terendah sebesar 0,21119. Jadi tingkat kesenjangan Ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo pada tahun 2012-2014 yang berada diurutan tertinggi tetap diduduki oleh Kabuapten Soppeng selanjutya pada tahun 2015 kesenjangan tertinggi berada pada kabupaten Wajo dan pada tahun selanjutnya kesenjangan tertinggi kembali pada kabupaten Soppeng, dan tiap tahun tingkat kesenjangan mengalami flukatif setiap tahunnya.

Apabila rata-rata angka indeks Entropi Theil ini dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita di masing-masing kabupaten maka akan nampak bahwa Kabupaten Wajo yang menempati angka PDRB perkapita tertinggi tetapi berada diurutan kedua tertinggi dalam rata-rata indeks kesenjangan Entropi Theil. Selanjutnya Kota Soppeng dengan rata-rata PDRB perkapita tertinggi kedua dan berada pada posisi tertingi dalam indeks kesenjangan Entropi Theil.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21 berikut ini:

Tabel 21

Rata-rata Indeks Entropi Theil dan PDRB Perkapita Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Periode 2012-2016

| Kabupaten | Rata-rata Indeks Entropi Theil | Rata-rata |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| Bone | 0.19888 | 19.97 |

| | | |
|---------|---------|-------|
| Soppeng | 0.75934 | 21.59 |
| Wajo | 0.73384 | 26.15 |

Sumber : Data diolah

Tabel 21 menunjukkan tingkat kesenjangan tertinggi pertama ditempati oleh Kabupaten Soppeng dengan jumlah indeks Entropi Theil 0,75934 dan tingkat PDRB perkapita berada di urutan kedua tertinggi dengan jumlah 21,59. Selanjutnya tingkat kesenjangan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Wajo dengan jumlah indeks Entropi Theil 0,73384 dan tingkat PDRB perkapita berada di urutan tertinggi dengan jumlah 26,51. Selanjutnya tingkat kesenjangan tertinggi ketiga ditempati oleh Kabupaten Bone dengan jumlah indeks Entropi Theil 0,19888 dan tingkat PDRB perkapita berada di urutan terendah dengan jumlah 19,97.

2. Hubungan Kesenjangan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teknik yang digunakan dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan Aplikasi Eviews 7. Dalam model analisis regresi data Panel yang menjadi variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel bebasnya adalah kesenjangan ekonomi.

Sebelum dilakukan analisis regresi data panel maka terlebih dahulu dilakukan Spesifikasi model untuk menentukan model regresi data panel yang tepat.

a. Uji Spesifikasi Model

Data panel diesmitasi menggunakan efek spesifikasi fixed. Uji yang dilakukan yaitu:

1. Uji Chow.

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Dari hasil pengolahan dengan program *E-Views 7.0* didapatkan hasil seperti tampilan berikut:

Tabel 22

Regresi Data Panel : Hasil tes Redundant Fixed Effect-Likelihood Ratio

| Effects Test | Probabilitas |
|--------------------------|--------------|
| Cross-section F | 0.0010 |
| Cross-section Chi-Square | 0.0001 |

Sumber : Data diolah *E-Views 7.0*

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas *Chi-square* sebesar 0.0010 sehingga menyebabkan ditolak. Maka model *fixed effect* adalah model yang sebaiknya digunakan.

2. Hausman Test

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik digunakan dari *fixed effect*.

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas *chi-square* lebih dari 0,05, maka sebaiknya model menggunakan *random effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Hasil Uji Hausman

| | Chi-Sq. Statistic | Probabilitas |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Cross-section random | 11.246028 | 0.0008 |

Sumber : Data diolah E-Views 7.0

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0,0008 Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan fixed effect.

b. Uji Sigifikasansi

1. Uji Parsial (test)

Tabel 24
Hasil Uji Parsial

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| KesenjanganEkonomi | 60.83395 | 14.37625 | 4.231559 | 0.0014 |
| C | -38.45917 | 14.42880 | -2.665445 | 0.0220 |

Sumber : Data diolah E-Views 7.0

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kesenjangan Ekonomi memiliki t-hitung sebesar 4.231559 dan probabilitas sebesar 0,0014. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel Kesenjangan Ekonomi signifikan dalam mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo. Nilai koefisien regresi sebesar 60,83395 menunjukkan bahwa Kesenjangan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan Kesenjangan

Ekonomi 1%, akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,231559%.

2. Koefensi Determinansi (R^2)

Tabel 25
Koefensi Determinansi

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.839339 |
| Adjusted R-squared | 0.795522 |

Sumber : Data diolah E-Views 7.0

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.839339. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 83,9%. Sisanya sebesar 16,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan menggunakan indeks Entropi Theil tiap kabupaten selama periode 2012-2016 penelitian berkisar antara 0,17470 sampai dengan 0.80376. Dimana tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Soppeng dengan rata-rata angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,75934 dan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Wajo dengan angka sebesar 0,73384. Sementara posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Bone dengan rata-rata angka Indeks Entropi Theil sebesar 0,19888.
2. Kesenjangan Ekonomi menunjukkan pengaruh signifikan dengan taraf keyakinan sebesar 83% dalam mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi peningkatan Kesenjangan Ekonomi 1%, akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23 %.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi di Kabupen Bone, Soppeng dan Wajo.

2. Dengan melihat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo, dapat diharapkan ada campur tangan atau kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kualitas dan produktifitas baik SDM maupun SDA sehingga pembangunan lebih adil dan merata.
3. Pemerintah provinsi perlu mengupayakan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul. 2017. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* Vol. 1.
- Arief Daryanto dan Yundy, Hafizrianda. 2010. *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi*. PT. IPB Press. Bogor.
- Baharaduddin, Eva. 2013. *Analisi kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Periode 2006-2010*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Bimbin, D.J. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- BPS Sulawesi Selatan. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015*.
- Darzal. 2016. *Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 4.
- Djojohadikusumo, Soemitro.1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Etharina. 2005. *Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi, Depok*, Universitas Indonesia, ISSN: 1858-2311, Vol.1, No.1, Agustus 2005.
- Huda, Nurul. 2015 *Ekonomi Pembangunan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Ilijas, Achjar. 2004. *Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil*. Global Mahartika. Jakarta
- Indrayanti, Agnes Ratih Ari. 2010. *Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah*. EFEKTIF *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol 1
- Jhingan, M. L, 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Joko Waluyo , *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan ekonomi Antar Daerah di Indonesia*. *Jurnal Universitas nasional Veteran Yogyakarta*.
- Khusnah, Lailatul. 2015. *Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 13.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah – Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga

- Mahardiki, Doni. 2013. *Analisis Perubahan Kesenjangan ekonomidan Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Indonesia 2006-2011*. Journal of Economics and Policy.
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma, LP3S
- Mubarak, Husni. *Analisi Disparitas Pendapatan di Kawasan Mamminasata*. Skripsi tidak diterbitkan. Gowa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sastra, Eka. 2017. *Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta. Expose
- Siregar, Budi Basa. 2012. *Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori& Aplikasi*. Padang. Baduose Media.
- Sudarlan. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan Di Indonesia*. Eksis Riset. Vol. 11.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhartono. 2015. *Ketimpangan dan Pembaangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 6.
- Sukirno, Sadono 2007, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta. Kencana
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. 2000. *Indikator indikator Makroekonomi*. ed.2. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. PT.Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Todaro, M.P dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan Jilid 1*. Erlanggan : Jakarta.
- Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Makassar.
- Waluyo. Joko. 2004. *Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Lintas Negara, Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 9 No. 1. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PDRB Kabupaten Bone, Soppeng Dan Wajo Tahun 2012-2016

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 12,730,120 | 13,531,849 | 14,821,376 | 16,050,615 | 17,504,817 |
| Soppeng | 4,259,551 | 4,567,539 | 4,882,195 | 5,131,018 | 5,554,054 |
| Wajo | 8,819,110 | 9,428,973 | 10,341,082 | 11,069,645 | 11,620,821 |
| Jumlah | 25,808,780 | 27,528,360 | 30,044,653 | 32,251,278 | 34,679,692 |

Lampiran 2

Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 728,737 | 734,119 | 783,515 | 742,912 | 746,973 |
| Soppeng | 226,202 | 225,512 | 225,709 | 226,116 | 226,305 |
| Wajo | 389,552 | 390,603 | 391,980 | 393,218 | 394,495 |
| Jumlah/Total | 1,344,491 | 1,350,234 | 1,401,204 | 1,362,246 | 1,367,773 |

Lampiran 3

PDRB Perkapita Kabupaten Bone Soppeng dan Wajo Tahun 2012-2016

| Kabupaten | Tahun | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bone | 17.468743 | 18.432773 | 18.916518 | 21.605001 | 23.434337 |
| Soppeng | 18.830738 | 20.254082 | 21.630483 | 22.691973 | 24.542338 |
| Wajo | 22.639109 | 24.139530 | 26.381658 | 28.151421 | 29.457460 |
| BOSOWA | 19.195949 | 20.387844 | 21.442026 | 23.675077 | 25.354859 |

Lampiran 4**Luas wilayah jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bone Soppeng dan Wajo Tahun 2016**

| Kabupaten | Luas | % | Jumlah | % | Kepadatan Penduduk |
|---------------|----------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| Bone | 4559.00 | 54.12 | 746,973 | 54.61 | 164 |
| Soppeng | 1359.44 | 16.14 | 226,305 | 16.55 | 166 |
| Wajo | 2506.20 | 29.75 | 394,495 | 28.84 | 157 |
| Bosowa | 8424.64 | 100 | 1,367,773 | 100 | 162 |

Lampiran 5**Hasil Perhitungan Indeks Entropi Theil Tahun 2012- 2106**

| Kabupaten | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Rata-rata |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Bone | 0.20479 | 0.19968 | 0.17470 | 0.20403 | 0.21119 | 0.18547 |
| Soppeng | 0.75115 | 0.76930 | 0.80376 | 0.72988 | 0.74259 | 0.79107 |
| Wajo | 0.71899 | 0.72465 | 0.79147 | 0.73108 | 0.70302 | 0.76144 |

Lampiran 6

Tabel Variabel Independent dan Dependent

| Kabupaten | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (Dependent) | Kesenjangan Ekonomi (Independent) |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Bone | 2012 | 17.4687432 | 0.640258394 |
| | 2013 | 18.43277267 | 0.640211533 |
| | 2014 | 18.91651847 | 0.594399284 |
| | 2015 | 21.60500113 | 0.675578429 |
| | 2016 | 23.43433702 | 0.702313585 |
| Soppeng | 2012 | 18.83073797 | 1.103925877 |
| | 2013 | 20.25408187 | 1.133669737 |
| | 2014 | 21.63048328 | 1.147868602 |
| | 2015 | 22.69197332 | 1.122801257 |
| | 2016 | 24.54233786 | 1.158577436 |
| Wajo | 2012 | 22.63910869 | 1.183595527 |
| | 2013 | 24.13952975 | 1.200762161 |
| | 2014 | 26.38165766 | 1.253620038 |
| | 2015 | 28.15142092 | 1.253151748 |
| | 2016 | 29.45746042 | 1.237832831 |

Lampiran 7

**Output Common Effect Model
Tahun 2012-2016**

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel Least Squares

Date: 07/14/18 Time: 06:42

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 15

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| KESENJANGAN_EKONOMI | 8.995751 | 2.815679 | 3.194878 | 0.0070 |
| C | 13.54687 | 2.913842 | 4.649142 | 0.0005 |
| R-squared | 0.439830 | Mean dependent var | | 22.57174 |
| Adjusted R-squared | 0.396740 | S.D. dependent var | | 3.564560 |
| S.E. of regression | 2.768587 | Akaike info criterion | | 4.998117 |
| Sum squared resid | 99.64594 | Schwarz criterion | | 5.092524 |
| Log likelihood | -35.48588 | Hannan-Quinn criter. | | 4.997111 |
| F-statistic | 10.20724 | Durbin-Watson stat | | 0.291152 |
| Prob(F-statistic) | 0.007037 | | | |

Lampiran 8

Output Fixed Effect Model Tahun 2012-2016

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/18 Time: 02:52

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 15

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| KESENJANGAN_EKONOMI | 60.83395 | 14.37625 | 4.231559 | 0.0014 |
| C | -38.45917 | 14.42880 | -2.665445 | 0.0220 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.839339 | Mean dependent var | 22.57174 |
| Adjusted R-squared | 0.795522 | S.D. dependent var | 3.564560 |
| S.E. of regression | 1.611868 | Akaike info criterion | 4.015843 |
| Sum squared resid | 28.57929 | Schwarz criterion | 4.204656 |
| Log likelihood | -26.11882 | Hannan-Quinn criter. | 4.013831 |
| F-statistic | 19.15565 | Durbin-Watson stat | 1.346105 |
| Prob(F-statistic) | 0.000113 | | |

Lampiran 9

**Output Random Effect Model
Tahun 2012-2016**

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
 Method: Panel EGLS (Period random effects)
 Date: 07/14/18 Time: 06:43
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 15
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| KESENJANGAN_EKONOMI | 8.995751 | 2.083349 | 4.317928 | 0.0008 |
| C | 13.54687 | 2.155981 | 6.283390 | 0.0000 |
| Effects Specification | | | | |
| | | | S.D. | Rho |
| Period random | | | 0.000000 | 0.0000 |
| Idiosyncratic random | | | 2.048505 | 1.0000 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.439830 | Mean dependent var | | 22.57174 |
| Adjusted R-squared | 0.396740 | S.D. dependent var | | 3.564560 |
| S.E. of regression | 2.768587 | Sum squared resid | | 99.64594 |
| F-statistic | 10.20724 | Durbin-Watson stat | | 0.291152 |
| Prob(F-statistic) | 0.007037 | | | |
| Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.439830 | Mean dependent var | | 22.57174 |
| Sum squared resid | 99.64594 | Durbin-Watson stat | | 0.291152 |

Lampiran 10

**Output Uji Chow
Tahun 2012-2016**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FE
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 13.676565 | (2,11) | 0.0010 |
| Cross-section Chi-square | 18.734113 | 2 | 0.0001 |

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
Method: Panel Least Squares
Date: 07/13/18 Time: 03:06
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 15

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| KESEKJANGAN_EKONOMI | 8.995751 | 2.815679 | 3.194878 | 0.0070 |
| C | 13.54687 | 2.913842 | 4.649142 | 0.0005 |
| R-squared | 0.439830 | Mean dependent var | | 22.57174 |
| Adjusted R-squared | 0.396740 | S.D. dependent var | | 3.564560 |
| S.E. of regression | 2.768587 | Akaike info criterion | | 4.998117 |
| Sum squared resid | 99.64594 | Schwarz criterion | | 5.092524 |
| Log likelihood | -35.48588 | Hannan-Quinn criter. | | 4.997111 |
| F-statistic | 10.20724 | Durbin-Watson stat | | 0.291152 |
| Prob(F-statistic) | 0.007037 | | | |

Lampiran 11

Hausman Test Tahun 2012-2016

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 11.246028 | 1 | 0.0008 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|---------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| KESENJANGAN_EKONOMI | 60.833952 | 16.579540 | 174.146203 | 0.0008 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/18 Time: 03:35

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 15

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -38.45917 | 14.42880 | -2.665445 | 0.0220 |
| KESENJANGAN_EKONOMI | 60.83395 | 14.37625 | 4.231559 | 0.0014 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.839339 | Mean dependent var | 22.57174 |
| Adjusted R-squared | 0.795522 | S.D. dependent var | 3.564560 |
| S.E. of regression | 1.611868 | Akaike info criterion | 4.015843 |
| Sum squared resid | 28.57929 | Schwarz criterion | 4.204656 |
| Log likelihood | -26.11882 | Hannan-Quinn criter. | 4.013831 |
| F-statistic | 19.15565 | Durbin-Watson stat | 1.346105 |
| Prob(F-statistic) | 0.000113 | | |

Lampiran 12

Surat Keterangan Penelitian



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Makassar, 10 JULI 2018

Nomor : B-132/BPS/7300/560/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **Bukti Penelitian**

Kepada Yth,
Ketua LP3M UNISMUH Makassar
di-
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 8349/S.01/PTSP/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Izin Penelitian maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : **AHMAD ARHAN P**
No. Pokok : 10571 01908 13
Program Studi : IESP / S1

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : **"ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016 (STUDI KASUS KABUPATEN BONE,SOPPENG DAN WAJO"**

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kasi Pengolahan Statistik



ARHAM, SSI.MM
NIP: 197509101997121001

Lampiran 13**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap penulis, yaitu Ahmad Arhan P lahir di Ujung Tanah. Pada tanggal 25 Januari 1995, merupakan anak ke-1 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Alwih dan Ibu Erni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2006 lulus dari SDN 127 Ujung Tanah. Kemudian melanjutkan di SMP 1 Bola dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan ke SMA 1 Bola dan lulus tahun 2013. Setelah itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS KESENJANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2012-2016 (Studi Kasus Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo)”.